



**LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Imam Bonjol No. 134 Telp. (024) 3546469 Fax. (024) 3551289

DAFTAR ISI

		Halaman
I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	i
II	Laporan Realisasi Anggaran	ii
III	Neraca Komparatif	iii
IV	Laporan Operasional	iv
V	Laporan Perubahan Ekuitas	v
VI	Catatan Atas Laporan Keuangan	vi
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	6
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	6
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	8
	3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	8
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	51
	4.1. Entitas Pelaporan	51
	4.2. Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	51
	4.3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	51
	4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	52
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	53
	5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	53
	5.1.1. Penjelasan Pos - Pos Pendapatan	53
	5.1.2. Penjelasan Pos - Pos Belanja	56
	5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	60
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	60
	5.2.1. Aset	60
	5.2.2. Ekuitas	70
	5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	70
	5.3.1. Pendapatan LO	70
	5.3.2. Beban	71
	5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	72

Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	73
	6.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	73
	6.2. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan	90
	6.2.1. Jumlah Pegawai	90
	6.2.2. Aset / Modal	90
	6.2.3. Profil UPT Dinas Kelautan dan Perikanan	95
	6.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	105
Bab 7	Penutup	106
	Lampiran Tambahan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607

Faksimile 024-3551289 Laman <http://dkp.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2022

PEMERINTAH PROVINSI
PENGUNA ANGGARAN
DKP

Ir. FENDIAWAN TISKANTORO, M.Si

NIP. 196801171990101001



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	#DIV/0!	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	#DIV/0!	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	#DIV/0!	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	#DIV/0!	-
8	Pajak Rokok		-	-	#DIV/0!	-
9	Retribusi Daerah		10.683.550.000,00	14.314.836.492,00	133,99	14.481.761.039,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	#DIV/0!	-
11	Retribusi Jasa Usaha		8.383.550.000,00	11.498.458.792,00	137,16	10.013.851.139,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		2.300.000.000,00	2.816.377.700,00	122,45	4.467.909.900,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	117.265.756,00	#DIV/0!	110.088.342,00
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
20	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	#DIV/0!	-
21	Jasa Giro		-	-	#DIV/0!	-
22	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
23	Pendapatan Bunga		-	-	#DIV/0!	-
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	#DIV/0!	-
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	#DIV/0!	-
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	#DIV/0!	-
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	117.265.756,00	#DIV/0!	110.088.342,00
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	#DIV/0!	-
31	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	#DIV/0!	-
32	Pendapatan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	#DIV/0!	-
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	#DIV/0!	-
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
38	Pendapatan Zakat		-	-	#DIV/0!	-
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksaan		-	-	#DIV/0!	-
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD		-	-	#DIV/0!	-
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		10.683.550.000,00	14.432.102.248,00	135,09	14.591.849.381,00
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
45	Dana Perimbangan		-	-	#DIV/0!	-
46	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	#DIV/0!	-
48	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
49	Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
50	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
53	Pendapatan Hibah		-	-	#DIV/0!	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	#DIV/0!	-
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	#DIV/0!	-
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	#DIV/0!	-
59	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
60	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
62	Lain-lain Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		10.683.550.000,00	14.432.102.248,00	135,09	14.591.849.381,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		35.289.538.000,00	34.035.200.037,00	96,45	45.931.232.862,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		16.733.718.000,00	16.268.521.515,00	97,22	17.369.045.689,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		18.555.820.000,00	16.652.362.397,00	89,74	17.921.337.173,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	1.114.316.125,00	#DIV/0!	10.640.850.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	#DIV/0!	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
76	Belanja Pegawai BOS		-	-	#DIV/0!	-
77	Belanja Pegawai BLUD		-	-	#DIV/0!	-
78	Belanja Barang dan Jasa		47.670.490.000,00	42.107.031.813,00	88,33	24.440.872.873,00
79	Belanja Barang		6.047.042.000,00	5.846.523.599,00	96,68	6.691.678.302,00
80	Belanja Jasa		22.879.905.000,00	20.074.315.097,00	87,74	4.615.747.832,00
81	Belanja Pemeliharaan		1.778.229.000,00	1.749.520.578,00	98,39	1.231.342.030,00
82	Belanja Perjalanan Dinas		4.573.726.000,00	4.290.178.875,00	93,80	2.918.703.733,00
83	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		12.391.588.000,00	10.146.493.664,00	81,88	8.983.400.976,00
84	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
85	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	#DIV/0!	-
86	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	#DIV/0!	-
87	Belanja Bunga		-	-	#DIV/0!	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
92	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	#DIV/0!	-
93	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
94	Belanja Subsidi		-	-	#DIV/0!	-
95	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
97	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
98	Belanja Hibah		35.878.820.000,00	23.846.242.732,00	66,46	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasvarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		35.878.820.000,00	23.846.242.732,00	66,46	-
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	#DIV/0!	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	#DIV/0!	-
106	Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	#DIV/0!	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	#DIV/0!	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	#DIV/0!	-
111	Jumlah Belanja Operasi		118.838.848.000,00	99.988.474.582,00	84,14	70.372.105.735,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
115	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.014.207.000,00	1.008.128.500,00	99,40	1.055.630.000,00
117	Belanja Modal Alat Besar		102.000.000,00	101.890.000,00	99,89	-
119	Belanja Modal Alat Angkutan		30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	594.600.000,00
120	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
121	Belanja Modal Alat Pertanian		65.000.000,00	64.800.000,00	99,69	-
122	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		157.190.000,00	156.328.000,00	99,45	246.052.000,00
123	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	207.978.000,00
124	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	#DIV/0!	-
125	Belanja Modal Alat Laboratorium		325.300.000,00	320.853.500,00	98,63	-
126	Belanja Modal Alat Persenjataaan		-	-	#DIV/0!	-
127	Belanja Modal Komputer		329.717.000,00	329.557.000,00	99,95	7.000.000,00
128	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
129	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	#DIV/0!	-
130	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	#DIV/0!	-
131	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
132	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	#DIV/0!	-
133	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	#DIV/0!	-
134	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	#DIV/0!	-
135	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	#DIV/0!	-
136	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
137	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	#DIV/0!	-
138	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		22.164.343.000,00	16.945.509.153,00	76,45	816.419.800,00
139	Belanja Modal Gedung		22.164.343.000,00	16.945.509.153,00	76,45	816.419.800,00
140	Belanja Modal Monumen		-	-	#DIV/0!	-
141	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	#DIV/0!	-
142	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	#DIV/0!	-
143	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		225.000.000,00	224.414.000,00	99,74	2.353.788.200,00
144	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	#DIV/0!	2.246.071.000,00
145	Belanja Modal Bangunan Air		200.000.000,00	199.714.000,00	99,86	107.717.200,00
146	Belanja Modal Instalasi		25.000.000,00	24.700.000,00	98,80	-
147	Belanja Modal Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
148	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
149	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	#DIV/0!	-
150	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
151	Belanja Modal Hewan		-	-	#DIV/0!	-
152	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	#DIV/0!	-
153	Belanja Modal Tanaman		-	-	#DIV/0!	-
154	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	#DIV/0!	-
155	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	#DIV/0!	-
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	#DIV/0!	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	#DIV/0!	-
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		-	-	#DIV/0!	-
160	Jumlah Belanja Modal		23.403.550.000,00	18.178.051.653,00	77,67	4.225.838.000,00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
166						

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	#DIV/0!	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	#DIV/0!	-
176	Jumlah Belanja Transfer		-	-	#DIV/0!	-
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		142.242.398.000,00	118.166.526.235,00	83,07	74.597.943.735,00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(131.558.848.000,00)	(103.734.423.987,00)	78,85	(60.006.094.354,00)
181						
182	PEMI PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PEI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	#DIV/0!	-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	#DIV/0!	-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
189	Penghematan Belanja		-	-	#DIV/0!	-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-	#DIV/0!	-
191	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	#DIV/0!	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	#DIV/0!	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	#DIV/0!	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	#DIV/0!	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	#DIV/0!	-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(131.558.848.000,00)	(103.734.423.987,00)	-	(60.006.094.354,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
NIP. 19650117 199010 1 001



NERACA KOMPARATIF
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	30.460.400,00
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	30.460.400,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Investasi Jangka Pendek		-	-
13	Investasi dalam Saham		-	-
14	Investasi dalam Deposito		-	-
15	Investasi dalam SUN		-	-
16	Investasi dalam SBI		-	-
17	Investasi dalam SPN		-	-
18	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
19	Piutang Pajak Daerah		-	-
20	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
21	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
22	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
23	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
24	Piutang Pajak Rokok		-	-
36	Piutang Retribusi Daerah		-	4.105.302.718,00
37	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
38	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	4.105.302.718,00
39	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
40	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
41	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-
42	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-
43	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		-	-
44	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
45	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
46	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
47	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
48	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
49	Piutang Jasa Giro		-	-
50	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-
51	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
52	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
53	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
54	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
55	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
56	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
57	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
58	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
59	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
60	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
61	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
62	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
63	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-
64	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
65	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
66	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
67	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
68	Piutang Dana Perimbangan		-	-
69	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
70	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
71	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
72	Piutang Dana Desa		-	-
73	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
74	Piutang Bagi Hasil		-	-
75	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
76	Piutang Lainnya		4.105.302.718,00	-
77	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		4.105.302.718,00	-
79	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
80	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
81	Uang Muka		-	-
82	Penyisihan Piutang		(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
83	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	(4.105.302.718,00)
84	Penyisihan Piutang Lainnya		(4.105.302.718,00)	-
85	Beban Dibayar Dimuka		114.357.138,10	91.543.111,34
86	Beban Dibayar Dimuka		114.357.138,10	91.543.111,34
87	Persediaan		1.088.601.707,72	1.136.331.507,00

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
88	Barang Pakai Habis		1.088.601.707,72	1.136.331.507,00
89	Barang Tak Habis Pakai		-	-
90	Barang Bekas Dipakai		-	-
91	JUMLAH ASET LANCAR		1.202.958.845,82	1.258.335.018,34
92				
93	INVESTASI JANGKA PANJANG			
94	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
95	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
96	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
97	Investasi dalam Obligasi		-	-
98	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
99	Dana Bergulir		-	-
100	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
101	Penyertaan Modal		-	-
102	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
103	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
104				
105	ASET TETAP			
106	Tanah		169.159.491.160,00	169.159.491.160,00
107	Tanah		169.159.491.160,00	169.159.491.160,00
108	Peralatan dan Mesin		51.754.153.516,00	48.650.850.402,00
109	Alat Besar		3.879.292.090,00	3.802.402.090,00
110	Alat Angkutan		21.291.549.383,00	19.274.581.783,00
111	Alat Bengkel dan Alat Ukur		1.113.103.295,00	1.113.103.295,00
112	Alat Pertanian		1.221.068.500,00	1.221.068.500,00
113	Alat Kantor dan Rumah Tangga		9.797.660.601,00	9.475.852.601,00
114	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.732.084.064,00	1.711.664.550,00
115	Alat Kedokteran dan Kesehatan		8.277.500,00	-
116	Alat Laboratorium		8.648.905.084,00	8.353.321.584,00
117	Alat Persenjataan		25.000.000,00	-
118	Komputer		3.825.728.999,00	3.492.371.999,00
119	Alat Eksplorasi		-	-
120	Alat Pengeboran		-	-
121	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
122	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
123	Alat Keselamatan Kerja		-	-
124	Alat Peraga		-	-
125	Peralatan Proses/Produksi		-	-
126	Rambu-rambu		11.000.000,00	6.000.000,00
127	Peralatan Olahraga		200.484.000,00	200.484.000,00
128	Gedung dan Bangunan		92.298.165.018,00	94.357.733.572,00
129	Bangunan Gedung		86.632.287.616,00	90.311.112.761,00
130	Monumen		-	-
131	Bangunan Menara		301.130.315,00	675.893.315,00
132	Tugu Titik Kontrol/Pasti		5.364.747.087,00	3.370.727.496,00
133	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		166.109.001.808,00	148.053.772.601,00
134	Jalan dan Jembatan		41.617.041.757,00	41.428.915.200,00
135	Bangunan Air		121.729.147.372,00	103.918.743.414,00
136	Instalasi		1.916.649.692,00	1.859.951.000,00
137	Jaringan		846.162.987,00	846.162.987,00
138	Aset Tetap Lainnya		512.347.698,00	512.347.698,00
139	Bahan Perpustakaan		512.347.698,00	512.347.698,00
140	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-
141	Hewan		-	-
142	Biota Perairan		-	-
143	Tanaman		-	-
144	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
145	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
146	Konstruksi dalam Pengerjaan		1.207.451.350,00	567.849.200,00
147	Konstruksi dalam Pengerjaan		1.207.451.350,00	567.849.200,00
148	Akumulasi Penyusutan		(118.375.304.176,75)	(103.156.501.106,11)
149	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(41.052.410.742,84)	(34.968.051.620,51)
150	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(26.808.880.818,22)	(24.996.483.340,51)
151	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(50.514.012.615,69)	(43.191.966.145,09)
152	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
153	JUMLAH ASET TETAP		362.665.306.373,25	358.145.543.526,89
154				
155	DANA CADANGAN			
156	Dana Cadangan		-	-
157	Dana Cadangan		-	-
158	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
159				
160	ASET LAINNYA			
161	Tagihan Jangka Panjang		-	-
162	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
163	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
164	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	758.166.000,00
165	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	758.166.000,00

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
166	Aset Tak Berwujud		-	1.081.344.220,00
167	Aset Tak Berwujud		-	1.081.344.220,00
168	Aset Lain-lain		8.973.653.323,00	10.758.615.353,00
169	Aset Lain-lain		8.973.653.323,00	10.758.615.353,00
170	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	(1.081.344.220,00)
171	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	(1.081.344.220,00)
172	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(7.561.670.868,30)	(7.804.968.015,69)
173	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(7.561.670.868,30)	(7.804.968.015,69)
174	JUMLAH ASET LAINNYA		1.411.982.454,70	3.711.813.337,31
175				
176	JUMLAH ASET		365.280.247.673,77	363.115.691.882,54
177				
178	KEWAJIBAN			
179	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
180	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
181	Utang Taspen		-	-
182	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
183	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
184	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
185	Utang PPh Pusat		-	-
186	Utang PPN Pusat		-	-
187	Utang Taperum		-	-
188	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
189	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
190	Utang Bunga		-	-
191	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
192	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
193	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
194	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
195	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
196	Utang Bunga BLUD		-	-
197	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
198	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
199	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
200	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
201	Utang Pinjaman BLUD		-	-
202	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
203	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
204	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
205	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)		-	-
206	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
207	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		-	-
208	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		-	18.150.000,00
209	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
210	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	18.150.000,00
211	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
212	Utang Belanja		-	-
213	Utang Belanja Pegawai		-	-
214	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
215	Utang Belanja Bunga		-	-
216	Utang Belanja Subsidi		-	-
217	Utang Belanja Hibah		-	-
218	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
219	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
220	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
221	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Iriqasi		-	-
222	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
223	Utang Belanja Tidak Terduqa		-	-
224	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
225	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
226	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
227	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
228	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
229	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
230	Utang Transfer		-	-
231	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	18.150.000,00
232				
233	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
234	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
235	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
236	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
237	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
238	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
239	Utang kepada LKB-BUMN		-	-
240	Utang kepada LKB-BUMD		-	-
241	Utang kepada LKB-Swasta		-	-
242	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
243	Utang kepada LKBB-BUMN		-	-
244	Utang kepada LKBB-BUMD		-	-
245	Utang kepada LKBB-Swasta		-	-
246	Utang kepada Masyarakat		-	-
247	Obligasi		-	-
248	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
249				
250	JUMLAH KEWAJIBAN		-	18.150.000,00
251				
252	EKUITAS			
272	EKUITAS		261.558.134.086,77	303.091.447.528,54
273	Ekuitas		364.070.475.392,96	293.272.040.436,55
274	Surplus/Defisit-LO		(102.512.341.306,19)	9.819.407.091,99
275	Ekuitas SAL		-	-
276	Estimasi Pendapatan		-	-
277	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
278	Apropriasi Belanja		-	-
279	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
280	Estimasi Perubahan SAL		-	-
281	Surplus/Defisit-LRA		-	-
282	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		103.722.113.587,00	60.006.094.354,00
283	RK PPKD		103.722.113.587,00	60.006.094.354,00
284	JUMLAH EKUITAS		365.280.247.673,77	363.097.541.882,54
285				
286	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		365.280.247.673,77	363.115.691.882,54

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
NIP. 19650117 199010 1 001



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
4	Paik Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
6	Paik Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
7	Paik Air Permukaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
8	Paik Rokok - LO		-	-	-	#DIV/0!
9	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		14.314.836.492,00	14.481.761.039,00	(166.924.547)	(1,15)
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	#DIV/0!
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		11.498.458.792,00	10.014.031.139,00	1.484.427.653	14,82
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		2.816.377.700,00	4.467.729.900,00	(1.651.352.200)	(36,96)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penjualan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	#DIV/0!
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penjualan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	#DIV/0!
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penjualan Modal pada Perusahaan Swasta - LO		-	-	-	#DIV/0!
16	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		117.265.756,00	110.088.342,00	7.177.414	6,52
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dinisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dinisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
20	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
21	Jasa Giro - LO		-	-	-	#DIV/0!
22	Hasil Pengelolaan Dana Berakumulasi - LO		-	-	-	#DIV/0!
23	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	#DIV/0!
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	#DIV/0!
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	#DIV/0!
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
28	Pendapatan Denda Paik Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		117.265.756,00	110.088.342,00	7.177.414	6,52
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	#DIV/0!
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berakumulasi - LO		-	-	-	#DIV/0!
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	#DIV/0!
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
38	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	#DIV/0!
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO		-	-	-	#DIV/0!
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		14.432.102.248,00	14.591.849.381,00	(159.747.133,00)	(1,09)
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		-	-	-	#DIV/0!
45	Dana Perimbangan - LO		-	-	-	#DIV/0!
46	Dana Insentif Daerah (DID) - LO		-	-	-	#DIV/0!
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
48	Pendapatan Baiti Hasil - LO		-	-	-	#DIV/0!
49	Bantuan Keuangan - LO		-	-	-	#DIV/0!
50	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
53	Pendapatan Hibah - LO		-	76.388.076.005,25	(76.388.076.005)	(100,00)
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO		-	76.388.076.005,25	(76.388.076.005)	(100,00)
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		-	-	-	#DIV/0!
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO		-	-	-	#DIV/0!
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO		-	-	-	#DIV/0!
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO		-	-	-	#DIV/0!
59	Dana Darurat - LO		-	-	-	#DIV/0!
60	Dana Darurat - LO		-	-	-	#DIV/0!
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO		-	-	-	#DIV/0!
62	Lain-lain Pendapatan - LO		-	-	-	#DIV/0!
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	76.388.076.005,25	(76.388.076.005,25)	(100,00)
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO		14.432.102.248,00	90.979.925.386,25	(76.547.823.138,25)	(84,14)
66						
67	BEBAN					
68	BEBAN OPERASIONAL					
69	Beban Pegawai		32.920.883.912,00	45.931.232.862,00	(13.010.348.950)	(28,33)
70	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		16.268.521.515,00	17.369.045.689,00	(1.100.524.174)	(6,34)
71	Beban Tambahan Penghasilan ASN		16.652.362.397,00	17.921.337.173,00	(1.268.974.776)	(7,08)
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	10.640.850.000,00	(10.640.850.000)	(100,00)
73	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	#DIV/0!
74	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
75	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
76	Beban Pegawai BOS		-	-	-	#DIV/0!
77	Beban Barang dan Jasa		44.174.802.457,04	17.370.357.815,08	26.804.444.642	154,31
78	Beban Barang		6.832.030.658,80	5.817.324.499,80	1.014.706.159	17,44
79	Beban Jasa		21.165.817.195,24	5.162.959.076,28	16.002.858.119	309,96
80	Beban Pemeliharaan		1.740.282.064,00	1.050.422.530,00	689.859.534	65,67
81	Beban Perjalanan Dinas		4.290.178.875,00	2.918.895.733,00	1.371.283.142	46,98
82	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		10.146.493.664,00	2.420.755.976,00	7.725.737.688	319,15
83	Beban Barang dan Jasa BOP		-	-	-	#DIV/0!
84	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	#DIV/0!
85	Beban Bunga		-	-	-	#DIV/0!
86	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
87	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	#DIV/0!
88	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	#DIV/0!
89	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	#DIV/0!
90	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obliqasi)		-	-	-	#DIV/0!
91	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	#DIV/0!
92	Beban Subsidi		-	-	-	#DIV/0!
93	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	#DIV/0!
94	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	#DIV/0!
95	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	#DIV/0!
96	Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	#DIV/0!
97	Beban Hibah		23.846.242.732,00	-	23.846.242.732	#DIV/0!
98	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
99	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
100	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	#DIV/0!
101	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	#DIV/0!
102	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi		23.846.242.732,00	-	23.846.242.732	#DIV/0!
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	#DIV/0!
	Beban Hibah Dana BOS		-	-	-	#DIV/0!

103	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	#DIV/0!
104	Beban Bantuan Sosial	-	6.562.645.000,00	(6.562.645.000)	(100,00)
105	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	#DIV/0!
106	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	#DIV/0!
107	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	6.562.645.000,00	(6.562.645.000)	(100,00)
108	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	#DIV/0!
109	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
110	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!
111	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
112	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Ditukarkan	-	-	-	#DIV/0!
113	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	-	-	-	#DIV/0!
114	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!
115	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	-	-	-	#DIV/0!
116	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
	Beban Lain-Lain	55.034.635,00	22.791.640,00	32.242.995	141,47
	Beban Lain-Lain	55.034.635,00	22.791.640,00	32.242.995	141,47
117	Jumlah Beban Operasional	100.996.963.736,04	69.887.027.317,08	31.109.936.419	44,51
118					
119	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
120	Beban Peralatan dan Mesin	4.363.525.072,33	4.582.023.271,98	(218.498.200)	(4,77)
141	Beban Gedung dan Bangunan	2.035.730.502,49	2.041.389.820,48	(5.659.318)	(0,28)
146	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.663.618.893,98	4.547.922.709,72	115.696.184	2,54
151	Beban Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
160	Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.465.833,33	114.465.575,00	(109.999.742)	(96,10)
161	Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.465.833,33	114.465.575,00	(109.999.742)	(96,10)
162	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	#DIV/0!
163	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	#DIV/0!
164	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.067.340.302,13	11.285.801.377,18	81.830.012.637,98	725,07
165					
166	BEBAN TRANSFER				
167	Beban Bagi Hasil	-	-	-	#DIV/0!
168	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	#DIV/0!
169	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	#DIV/0!
170	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	#DIV/0!
171	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	#DIV/0!
172	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	#DIV/0!
173	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	#DIV/0!
174	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	#DIV/0!
175	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	#DIV/0!
176					
177	JUMLAH BEBAN	112.064.304.038,17	81.172.828.694,26	30.891.475.343,91	38,06
178					
179	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(97.632.201.790,17)	9.807.096.691,99	(107.439.298.482,16)	(1.095,53)
180					
181	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
182	SURPLUS NON OPERASIONAL				
183	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	#DIV/0!
184	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Diisahkan-LO	-	-	-	#DIV/0!
185	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Diisahkan-LO	-	-	-	#DIV/0!
186	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	#DIV/0!
187	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	#DIV/0!
188	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	#DIV/0!
189	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	#DIV/0!
190	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	#DIV/0!
191	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	-	-	-	#DIV/0!
192	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	
193	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	
194	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	#DIV/0!
195					
196	DEFISIT NON OPERASIONAL				
197	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	909.754.782,61	-	909.754.783	#DIV/0!
198	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Diisahkan-LO	909.754.782,61	-	909.754.783	#DIV/0!
199	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Diisahkan-LO	-	-	-	#DIV/0!
200	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	#DIV/0!
201	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	#DIV/0!
202	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	#DIV/0!
203	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	#DIV/0!
204	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	-	-	-	#DIV/0!
205	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	3.970.384.733,41	-	-	
206	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	3.970.384.733,41	-	-	
207	Jumlah Defisit Non Operasional	4.880.139.516,02	-	1.819.509.565,22	#DIV/0!
208					
209	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4.880.139.516,02)	-	1.819.509.565,22	#DIV/0!
210					
211	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(102.512.341.306,19)	9.807.096.691,99	(105.619.788.916,94)	(1.076,97)
212					
213	POS LUAR BIASA				
214	PENDAPATAN LUAR BIASA				
215	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	#DIV/0!
216	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	#DIV/0!
217	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
218					
219	BEBAN TAK TERDUGA				
220	Beban Tak Terduga	-	-	-	#DIV/0!
221	Beban Tak Terduga	-	-	-	#DIV/0!
222	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
223					
224	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
225					
226	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(102.512.341.306,19)	9.807.096.691,99	(105.619.788.916,94)	(1.076,97)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
NIP. 19650117 199010 1 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	Ekuitas Awal	363.097.541.882,54	293.484.352.436,55
2	Surplus/Defisit-LO	(102.512.341.306,19)	9.807.096.691,99
3	RK PPKD	103.722.113.587,00	60.018.404.754,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	972.933.510,42	(212.312.000,00)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	937.777.260,52	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	2.163.082.368,42	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	(1.225.305.107,90)	
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	1.341.000.000,00	(261.560.000,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		310.184.554,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	1.381.480.000,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		(571.744.554,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(40.480.000,00)	
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(1.305.843.750,10)	49.248.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(1.305.843.750,10)	(30.861.346,50)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		80.109.346,50
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-

	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	365.280.247.673,77	363.097.541.882,54

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
NIP. 19650117 199010 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah mengamanatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan, untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya.

Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yang berciri : memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal berkarakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dengan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : Pendapatan, Belanja dan Surplus/defisit.
- b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas. Dalam neraca semua jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- s. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015873 tanggal 11 November 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada OPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan OPD

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional atau pertumbuhan output dalam periode tertentu serta menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang dan jasa secara fisik pada periode tertentu. Menurut Herlan Firmansyah (2009), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas SDM, SDA, Investasi/modal, sistem sosial, politik dan budaya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Bidang Kelautan dan Perikanan serta mengacu kinerja investasi usaha perikanan yang selaras dengan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi perkembangan wilayah yang disertai upaya peningkatan mediasi antara usaha Kelautan dan Perikanan sebagai pihak penyedia dengan dunia industri sebagai pihak pengguna.
- b. Mengintensifkan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan pada kawasan konsentrasi potensi sumber daya potensial yang mampu menggerakkan sistem ekonomi untuk menciptakan kondisi kompetitif wawasan maupun wilayah Jawa Tengah.
- c. Mensinergikan keterkaitan peran secara harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam mekanisme fungsional pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat perekonomian Jateng tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,32% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65%.

Struktur ekonomi Jateng tahun 2021 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,31%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,14%. Menguatnya konsumsi rumah tangga ini karena peningkatan kebutuhan rumah tangga, setelah masyarakat terbiasa dengan kondisi pandemi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Target Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 10.683.550.000,00 terealisasi sebesar Rp 14.432.102.248,00 capaian 135,09%. Realisasi target pendapatan tersebut terdiri dari :

- Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Laboratorium, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Ruang, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan meliputi Tambat Labuh, Pas Masuk, Jasa Kebersihan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi Penerimaan Balai Benih dan Penjualan Produksi Es, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Lahan, Sewa Workshop dan Sewa Rumah Dinas dengan target Rp 8.383.550.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 11.498.546.792,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu meliputi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi dengan target Rp 2.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.804.553.400,00
- Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 41.978.736,00 dan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp 75.287.020,00.

2.2.2. Kebijakan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

a. Belanja Operasi

Anggaran untuk Belanja Operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 118.838.848.000,00 dengan perincian :

- a. Belanja Pegawai Rp 35.289.538.000,00
- b. Belanja Barang Jasa Rp 47.670.490.000,00
- c. Belanja Hibah Rp 35.878.820.000,00

Adapun realisasinya sebesar Rp 99.988.474.582,00 atau 84,14% dengan perincian:

- a. Belanja Pegawai Rp 32.920.883.912,00
- b. Belanja Barang Jasa Rp 43.221.347.938,00
- c. Belanja Hibah Rp 23.846.242.732,00

b. Belanja Modal

Anggaran untuk Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 23.403.550.000,00 dengan perincian :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 1.014.207.000,00
- b. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 22.164.343.000,00
- c. Belanja Jalan, Jaringan,& Irigasi Rp 225.000.000,00

Adapun realisasinya sebesar Rp 18.178.051.653,00 atau 77,67% dengan perincian :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 1.008.128.500,00
- b. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 16.945.509.153,00
- c. Belanja Jalan, Jaringan,& Irigasi Rp 224.414.000,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 diindikasikan dengan membandingkan antara jumlah realisasi dengan anggaran belanja. Selain itu realisasi pencapaian target kinerja keuangan juga diukur keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan anggaran hasil/ keluaran untuk masing-masing program/ kegiatan. Berdasarkan pada tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021, Dinas Kelautan telah berhasil mencapai target kinerja keuangan tahun anggaran 2021 secara efektif dan efisien.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target kinerja keuangan secara efektif dan efisien dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Selain adanya faktor-faktor yang mendukung, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2021.

3.2.1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan :

1. SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas.
2. Penggunaan Sarana dan Prasarana teknologi informasi dalam menunjang kinerja pegawai sehingga dapat lebih efektif dan efisien.
3. SDM yang memiliki disiplin dan loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas pekerjaan

3.2.2. Kendala dan Hambatan

Disamping faktor pendukung, terdapat juga faktor yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Dapat Dikendalikan
 - a. Kurangnya jumlah SDM utamanya Tenaga Teknis di Lapangan.
 - b. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang sesuai.
 - c. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah, yang masih dibawah tingkat rata-rata konsumsi ikan nasional sehingga perlu dilakukan perluasan penerima manfaat untuk kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Ikan (Gemarikan).
 - d. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan.
 - e. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) maka perlu penataan tata ruang laut dan sumber daya ikan di Jawa Tengah.

2. Tidak Dapat Dikendalikan (Force Majeur)
- Faktor alam berpengaruh besar pada pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yakni :
- a. Adanya fenomena anomali cuaca sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi dan kegiatan kelautan dan perikanan.
 - b. Adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan perekonomian global mengalami kontraksi yang tentu juga berpengaruh terhadap sektor kelautan dan perikanan.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

FUNGSI :

SUB FUNGSI :

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	REALIASI		KETERANGAN
				FISIK %	KEUANGAN %	
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Kelautan dan Perikanan	142,242,398,000	118,166,526,235	99.02	83.07	
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43,295,299,000	40,403,688,839	100	93.32	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500,620,000	464,358,900	100	92.76	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	40,000,000	39,852,000	100	99.63	
1	Forum OPD	12,500,000	12,500,000	100	100	.
2	ATK Kegiatan	16,000,000	15,852,000	100	99.08	
3	Penggandaan Kegiatan	11,500,000	11,500,000	100	100	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	120,420,000	105,489,000	100	87.6	
1	Penyusunan RKA 2022	107,450,000	92,550,000	100	86.13	RKA 2022 telah tersusun
2	ATK Kegiatan	7,720,000	7,689,000	100	99.6	
3	Penggandaan Kegiatan	5,250,000	5,250,000	100	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	87,000,000	74,446,400	100	85.57	

	Perangkat Daerah **					
1	Perjalanan Dalam Daerah dalam rangka koordinasi/identifikasi	60,750,000	60,748,000	100	100	
2	Perjalanan Luar Daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi/rapat	26,250,000	13,698,400	100	52.18	Perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan karena undangan pertemuan dan koordinasi ke luar daerah dapat dilaksanakan dengan zoom sehingga ada anggaran perjalanan dinas yang tidak diserap dan menjadi silpa.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	253,200,000	244,571,500	100	96.59	
1	Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan	27,000,000	26,712,000	100	98.93	Penyelenggaraa n melalui desk tiap eselon 3
2	Perjalanan Dalam Daerah dalam rangka koordinasi/identifikasi	49,540,000	49,540,000	100	100	perjalanan dinas dapat deilaksanakan sesuai rencana untuk evaluasi dan monitoring pada akhir tahun anggaran
3	Perjalanan Luar Daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi/rapat	12,760,000	4,847,500	100	37.99	tujuan perjalanan dinas untuk konsultasi/rapat/ko ordinasi keluar daerah telah dipenuhi melalui pertemuan daring/zoom sehingga penyampaian laporan/koordinasi tetap dapat dilaksanakan namun perjalanan secara fisik tidak dilaksanakan sehingga berpotensi silpa
4	Evaluasi Kinerja Kegiatan	163,900,000	163,472,000	100	99.74	Dilakukan secara luring dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda, BPKAD, Biro APBJ, serta eselon 3 dan eselon 4 lingkup DKP Jateng
	Administrasi Keuangan	35,349,758,000	32,981,103,912	100	93.3	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	35,289,538,000	32,920,883,912	100	93.29	

1	Gaji dan Tunjangan ASN	16,733,718,000	16,268,521,515	100	97.22	tidak ada masalah
2	Tambahan Penghasilan PNS	18,555,820,000	16,652,362,397	100	89.74	tidak ada masalah
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **	55,220,000	55,220,000	100	100	
1	Desk Kinerja Pendapatan	46,460,000	46,460,000	100	100	tidak ada masalah
2	Desk Kinerja Belanja	8,760,000	8,760,000	100	100	tidak ada masalah
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran **	5,000,000	5,000,000	100	100	
1	Monitoring dan Evaluasi Laporan Semesteran	5,000,000	5,000,000	100	100	
	Administrasi Umum	7,434,921,000	6,957,668,726	100	93.58	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	56,108,000	50,054,014	100	89.21	
1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Daerah	420,000	415,000	100	98.81	Belanja Materai dan paket pengiriman terlaksana 100%
2	Belanja materai untuk keperluan laporan pertanggungjawaban kegiatan	2,370,000	2,370,000	100	100	
3	Materai 6000	2,118,000	2,118,000	100	100	Telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4	Jasa pengiriman	322,000	322,000	100	100	
5	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	1,902,000	1,900,000	100	99.89	kegiatan telah selesai dilaksanakan
6	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1,413,000	1,408,000	100	99.65	
7	Penyediaan jasa paket pengiriman	3,000,000	2,072,700	100	69.09	Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan
8	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1,485,000	1,485,000	100	100	
9	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1,410,000	1,365,040	100	96.81	Pengiriman surat sesuai kebutuhan karena pengiriman dokumen sebagian besar dibawa langsung oleh staff
10	KEGIATAN : Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah PPP Karimunjawa Kelas B	1,425,000	1,423,000	100	99.86	
11	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1,200,000	1,200,000	100	100	
12	Belanja Jasa Kantor	225,000	149,500	100	66.44	Belanja paket/pengiriman digunakan sesuai

						dengan kebutuhan saat ini masih tersisa pagu anggaran Rp. 75.500,-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,482,000	2,402,274	100	96.79	
14	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,210,000	3,210,000	100	100	sudah menyelesaikan kegiatan belanja materai
15	Belanja Pos Lainnya	1,050,000	1,050,000	100	100	
16	Belanja Jasa Kantor	876,000	461,500	100	52.68	Realisasi Fisik telah terlaksana 100% walaupun anggaran tidak terserap seluruhnya dikarenakan sesuai kebutuhan real
17	Penyediaan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	3,000,000	2,800,000	100	93.33	silpa
18	Belanja Perangkat, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	1,200,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
19	Belanja Paket/Pengiriman	260,000	260,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
20	Pengiriman Surat	600,000	496,000	100	82.67	.
21	Materai	600,000	600,000	100	100	
22	SURAT MENYURAT	2,040,000	2,033,500	100	99.68	Kegiatan berupa belanja materai dan pengiriman berkas berupa laporan ke instansi terkait
23	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17,500,000	14,047,000	100	80.27	tidak ada masalah
24	Paket/Pengiriman	6,000,000	5,265,500	100	87.76	tidak ada masalah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	2,361,946,000	1,994,526,163	100	84.44	
1	belanja air, telepon, internet dan listrik selama 12 bulan	34,901,000	33,223,728	100	95.19	tidak terdapat permasalahan karena anggaran dikeluarkan sesuai dengan tagihan bulanan
2	Belanja Telpn	11,778,000	5,196,063	100	44.12	Telah sesuai dengan

						pemakaian, karena ada Loka Tambaksogra dan LPKIL Singasari tidak menggunakan Telpon sehingga anggaran telpon tidak terserap 100 %
3	Belanja Air	16,043,000	12,073,770	100	75.26	Sudah sesuai dengan pemakaian, karena ada beberapa loka yaitu Loka Janti, Loka Ngrajek, Loka Tambaksogra dan LPKIL Singasari tidak menggunakan air dari PDAM , karena banyak yang menggunakan sumber air.
4	Belanja Listrik	187,000,000	177,491,030	100	94.91	Telah sesuai dengan pemakaian / kebutuhan, target fisik sudah terpenuhi 100 % namun terjadi Sisa anggaran yang disebabkan kurangnya pencermatan dalam menyusun anggaran
5	Belanja Kawat/faksimili/Internet/Intranet	37,086,000	35,984,335	100	97.03	Sudah sesuai dengan pemakaian, target fisik untuk kebutuhan internet telah terpenuhi 100%, namun untuk target keuangan terjadi SILPA, karena kurangnya pencermatan dalam penganggaran.
6	Belanja Telepon	605,000	409,840	100	67.74	Pembayaran tagihan telepon telah terlaksana 100%. - Telepon/Fax di Rumah Dinas Tanjungsari sudah tidak aktif (hanya membayar agumen /denda bulanan saja)

7	Belanja Air	1,900,000	1,889,800	100	99.46	Pembayaran tagihan PDAM bulan November melebihi sisa pagu anggaran TA 2021, dikarenakan pagu PDAM terkena rasionalisasi TA 2021.
8	Belanja Listrik	11,000,000	10,911,506	100	99.2	Pembayaran tagihan listrik dibayarkan sesuai dengan nota tagihan yang ada, dan belanja token listrik dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
9	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000	10,362,839	100	86.36	Pembayaran tagihan internet dibayarkan sesuai dengan jumlah nota tagihan yang ada, - koneksi internet di kantor PPP Asemdayong terkadang mengalami trobel / koneksi lemot, sehingga dalam pengerjaan tugas terkadang mengalami kesulitan.
10	Jasa Komunikasi	428,651,000	427,374,019	100	99.7	Kegiatan berupa pembayaran listrik, air, telepon dan internet yang secara fisik telah terealisasi pada bulan Desember. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan di pelabuhan
11	Belanja jasa komunikasi, listrik dan air	194,000,000	159,046,323	100	81.98	tidak ada permasalahan dan dilakukan penghematan listrik dll.
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	36,437,000	27,716,670	100	76.07	
13	Belanja Barang dan Jasa	32,444,000	31,712,136	100	97.74	kegiatan telah selesai dilaksanakan
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	42,500,000	31,567,515	100	74.28	Pekerjaan sudah selesai

15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Lистраik Perangkat Daerah	36,000,000	29,045,576	100	80.68	1. Pembayaran telepon hanya membayar abonemen sebesar Rp. 51.000,00 per bulan sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.333,00 per bulan 2. Pembayaran air, listrik dan kawat internet sesuai kebutuhan kantor dan ada beberapa sisa kegiatan.
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah PPP Karimunjawa Kelas B	116,363,000	114,293,073	100	98.22	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah PPP Karimunjawa sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Target
17	Belanja Telepon	900,000	419,340	100	46.59	Pembayaran tagihan telepon dibayarkan setiap awal bulan sesuai tagihan atau pemakaian rekening telepon setiap bulan nya dan masih tersisa pagu anggaran sebesar Rp. 480.660
18	Belanja Air	12,000,000	9,335,750	100	77.8	Pembayaran tagihan air dibayarkan setiap awal bulan sesuai tagihan atau pemakaian rekening air setiap bulan nya dan masih tersisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.664.250
19	Belanja Listrik	228,000,000	127,789,547	100	56.05	Pembayaran tagihan listrik dibayarkan setiap awal bulan sesuai tagihan atau pemakaian rekening listrik setiap bulan nya dan masih tersisa pagu anggaran sebesar Rp. 100.210.453

20	Belanja Kawat/faksimili/Internet/Internet	7,800,000	6,884,983	100	88.27	Pembayaran tagihan internet dan fax dibayarkan setiap awal bulan sesuai tagihan atau pemakaian rekening internet dan fax setiap bulan nya dan masih tersisa pagu anggaran sebesar Rp. 915.017
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,550,000	32,297,914	100	88.37	Masih terdapat deviasi negatif karena permasalahan kerusakan MCB di bulan kemaren menyebabkan tidak bisa melakukan pembelanjaan listrik
22	Belanja Telepon	4,249,000	3,078,237	100	72.45	sudah selesai melakukan pembayaran belanja tersebut sesuai dengan tagihan tiap bulannya
23	Belanja Air	14,580,000	14,249,940	100	97.74	sudah selesai melakukan pembayaran belanja tersebut sesuai dengan tagihan tiap bulannya
24	Belanja Listrik	213,305,000	205,179,221	100	96.19	sudah selesai melakukan pembayaran belanja tersebut sesuai dengan tagihan tiap bulannya
25	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19,500,000	16,681,223	100	85.54	sudah selesai melakukan pembayaran belanja tersebut sesuai dengan tagihan tiap bulannya
26	Belanja Air	4,878,000	4,409,000	100	90.39	Realisasi fisik telah terlaksana 100% hingga Desember walaupun realisasi anggaran belum terserap 100% karena sesuai tagihan

27	Belanja Listrik	15,858,000	15,805,000	100	99.67	Pembelian token listrik telah terlaksana 100% hingga bulan Desember 2021, pembelanjaan token listrik telah terealisasi sesuai kebutuhan kantor PPP Larangan
28	Belanja kawat /Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8,500,000	7,753,160	100	91.21	Realisasi fisik telah terlaksana 100% hingga Desember 2021, anggaran masih tersisa karena pembayaran sesuai dengan tagihan
29	penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	40,000,000	35,606,119	100	89.02	Pembayaran listrik, telpon dan internet rencana awal bulan Desember 2021 sudah 100%
30	Belanja Telepon	6,130,000	5,885,748	100	96.02	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
31	Belanja Listrik	17,000,000	15,268,032	100	89.81	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
32	Langganan Air	1,600,000	951,100	100	59.44	
33	Langganan Telpon/ Internet	13,200,000	12,233,661	100	92.68	
34	Langganan Listrik	22,800,000	22,501,409	100	98.69	Pagu Anggaran Sudah Habis
35	Telepon	15,438,000	6,973,736	100	45.17	tidak ada masalah
36	Air	34,750,000	14,479,429	100	41.67	tidak ada masalah
37	Listrik	350,200,000	260,125,391	100	74.28	tidak ada masalah
38	Kawat/Faksimili/Internet/Pos	96,000,000	68,320,000	100	71.17	tidak ada masalah
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	125,000,000	124,815,587	100	99.85	
1	Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	125,000,000	124,815,587	100	99.85	tidak ada masalah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	150,000,000	129,064,400	100	86.04	
1	KIR Kendaraan Dinas	12,000,000	1,065,700	100	8.88	tidak ada masalah
2	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	138,000,000	127,998,700	100	92.75	tidak ada masalah

	Oprasional					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	906,800,000	878,560,000	100	96.89	
1	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	856,800,000	853,560,000	100	99.62	teralisasi sesuai dengan rencana
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	50,000,000	25,000,000	100	50	teralisasi sesuai rencana
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	450,000,000	448,269,000	100	99.62	
1	Souvenir/Cendera Mata	32,000,000	31,900,000	100	99.69	tidak ada masalah
2	Jasa Keamanan	206,000,000	205,861,000	100	99.93	honor keamanan terbayarkan tepat waktu
3	Jasa Kebersihan	212,000,000	210,508,000	100	99.3	honor kebersihan terbayarkan sesuai rencana
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	71,730,000	71,730,000	100	100	
1	Alat Tulis Kantor	71,730,000	71,730,000	100	100	tidak ada masalah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	57,180,000	32,804,316	100	57.37	
1	Fotocopy dan Penjilidan	10,980,000	10,980,000	100	100	tidak ada masalah
2	Cetak	46,200,000	21,824,316	100	47.24	tidak ada masalah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	77,630,000	77,630,000	100	100	
1	Peralatan Kelistrikan dan Instalasi Bangunan Kantor	66,230,000	66,230,000	100	100	tidak ada masalah
2	Jasa Pemasangan dan Instalasi Listrik dan Air	11,400,000	11,400,000	100	100	tidak ada masalah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	558,837,000	558,125,000	100	99.87	
1	Belanja Tanaman Anggrek	12,000,000	12,000,000	100	100	tidak ada masalah
2	Perbaikan Mesin Ketik, Fax dan Penghancur Kertas	6,000,000	6,000,000	100	100	
3	Belanja Alat Pemotong Rumput	32,000,000	31,680,000	100	99	
4	Pembelian Bendera dan Umbul-Umbul	5,600,000	5,600,000	100	100	
5	Pengadaan Personal Computer (PC)	266,827,000	266,827,000	100	100	
6	Pengadaan Printer	62,890,000	62,730,000	100	99.75	tidak ada masalah
7	Perbaikan Running Text	12,000,000	11,940,000	100	99.5	tidak ada masalah
8	Pengadaan AC	55,000,000	54,828,000	100	99.69	
9	Bahan Kebersihan	106,520,000	106,520,000	100	100	tidak ada masalah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	61,599,000	61,312,000	100	99.53	
1	Peralatan Rumah Tangga	61,599,000	61,312,000	100	99.53	tidak ada masalah

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	17,600,000	17,600,000	100	100	
1	Surat Kabar/Majalah	17,600,000	17,600,000	100	100	tidak ada masalah
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	125,750,000	125,596,500	100	99.88	
1	Makanan dan Minuman Rapat	71,000,000	70,863,800	100	99.81	tidak ada masalah
2	Makanan Dan Minuman Tamu	54,750,000	54,732,700	100	99.97	tidak ada masalah
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	451,641,000	435,498,056	100	96.43	
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	379,641,000	379,127,382	100	99.86	tidak ada masalah
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	72,000,000	56,370,674	100	78.29	tidak ada masalah
	Pengadaan Mebeleur **	50,000,000	49,830,000	100	99.66	
1	kursi talkshow ruang kepala dinas	18,000,000	18,000,000	100	100	
2	kursi rapat (ppp wonokerto)	17,000,000	17,000,000	100	100	
3	kursi tunggu pelayanan (ppp klidanglor)	15,000,000	14,830,000	100	98.87	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	409,350,000	401,248,233	100	98.02	
1	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	359,350,000	356,677,571	100	99.26	tidak ada masalah
2	Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	50,000,000	44,570,662	100	89.14	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	382,100,000	382,037,943	100	99.98	
1	Jasa Service	83,500,000	83,489,232	100	99.99	tidak ada masalah
2	Penggantian Suku Cadang	120,900,000	120,861,021	100	99.97	tidak ada masalah
3	Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	133,100,000	133,100,000	100	100	tidak ada masalah
4	Minyak Pelumas/Oli	44,600,000	44,587,690	100	99.97	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	57,650,000	57,577,514	100	99.87	
1	Pemeliharaan/Perbaikan Pompa Air	10,000,000	10,000,000	100	100	
2	Pemeliharaan/Perbaikan Alat Studio dan Komunikasi	20,000,000	19,927,514	100	99.64	
3	Pemeliharaan/Perbaikan AC	27,650,000	27,650,000	100	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	50,000,000	50,000,000	100	100	
1	Pemeliharaan/Perbaikan Personal Computer dan Laptop	50,000,000	50,000,000	100	100	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	1,014,000,000	1,011,390,000	100	99.74	
1	rehab gedung dkp prov. jateng	938,000,000	935,755,500	100	99.76	tidak ada masalah
2	rehab gudang peralatan mesin kantor dinas	76,000,000	75,634,500	100	99.52	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber	10,000,000	557,301	100	5.57	

	Daya Aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	10,000,000	557,301	100	5.57	
1	Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	5,000,000	0	100	0	tidak ada masalah
2	Pelatihan Kepegawaian, Penataan Aset, Keuangan dan Kompetensi Lainnya	5,000,000	557,301	100	11.15	tidak ada masalah
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	7,382,821,000	6,602,341,138	99.06	89.43	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,704,321,000	1,658,582,581	95.95	97.32	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat **	480,060,000	440,485,659	85.61	91.76	
1	Sosialisasi Peraturan Ruang Laut di 18 Kab/Kota	162,725,000	158,450,000	97.38	97.37	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Akan tetapi terdapat Silpa berupa penggandaan buku peraturan gubernur pengelolaan ruang laut. Dikarenakan perubahan peraturan perizinan penggunaan ruang laut yang kembali dipegang oleh KKP, maka buku pergub 64/2019 tidak lagi diperbanyak.
2	Sosialisasi Hasil Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kab. Jepara, Kab. Tegal dan Kab. Rembang	39,375,000	38,375,000	91.83	97.46	Sosialisasi Hasil Pencadangan Kawasan Konservasi berupa perubahan zonasi yang disesuaikan dengan PerMen KP 31/2020 telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi terdapat Silpa dari transportasi perjalanan dinas.
3	Pembahasan Peraturan Tindak Lanjut Perda RZWP3K	25,600,000	25,600,000	31.23	100	Dikarenakan perubahan peraturan mengenai perizinan ruang laut yang mana pemberian izin kini menjadi kewenangan KKP, maka pembahasan

						peraturan tindak lanjut Perda RZWP3K ditiadakan.
4	Rakor Pengelolaan Ruang Laut di Provinsi	74,900,000	70,900,000	83.38	94.66	Rakor Pengelolaan Ruang Laut telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Akan tetapi terdapat silpa berupa uang harian peserta rakor dikarenakan peserta rakor adalah OPD provinsi jawa tengah .
5	Dukungan Manajemen dan Administrasi Teknis Lainnya	177,460,000	147,160,659	82.24	82.93	Secara garis besar kegiatan manajemen dan administrasi teknis telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi terdapat Silpa berupa UH dan transportasi perjalanan dinas luar daerah, Silpa biaya asuransi Non ASN dan Silpa honor tim teknis perizinan ruang laut (karena perizinan ruang laut berubah menjadi kewenangann KKP).
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **	1,224,261,000	1,218,096,922	100	99.5	
1	Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	9,750,000	9,750,000	100	100	Realisasi fisik sudah 100 persen dan lebih cepat dari perencanaan dikarenakan segera dilakukan penanaman mangrove pada Bulan Apri
2	Pendukung Administrasi Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	76,074,000	74,818,368	100	98.35	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Desember 2021; 2. Belanja sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
3	Pengadaan dan Penanaman Bibit Mangrove	192,500,000	191,962,000	100	99.72	1. Realisasi fisik sudah 100 persen dengan penanaman sebanyak 74.500

						batang pada Bulan Mei 2021; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa kontrak.
4	Belanja Peralatan Monitoring Ekosistem Mangrove	8,000,000	8,000,000	100	100	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Maret 2021; 2. Belanja sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
5	Bibit Mangrove	175,000,000	173,304,000	100	99.03	
6	Dukungan Administrasi Mangrove	271,380,000	271,075,484	100	99.89	
7	Dukungan Administrasi (TKB)	45,149,000	44,782,950	100	99.19	Kegiatan TKB Sudah dilaksanakan 100%
8	Honorarium Non PNS	92,400,000	92,400,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
9	Sertifikasi Selam dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Konservasi	30,000,000	29,933,500	100	99.78	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Maret 2021; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa kegiatan.
10	Rakor Perundang-undangan Wilayah Kerja CDK Wil. Selatan (1 kali x 1 hari)	13,975,000	13,975,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
11	Sosialisasi Ekosistem Mangrove (2 kali x 1 hari)	30,775,000	30,400,000	100	98.78	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan dengan silpa keuangan yaitu sewa gedung yang tidak dapat dikeluarkan karena menggunakan aset pemerintah
12	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	3,850,000	3,850,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
13	Perjalanan Koordinasi, Konsultasi dan	100,833,000	100,833,000	100	100	Target indikator pada triwulan

	Undangan (24 jam) (4 org x 1 hari x 50 kali)					keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
14	Belanja Alat Tulis Kantor	6,225,000	6,225,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
15	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	165,500,000	164,087,620	100	99.15	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan dengan silpa keuangan akibat adanya perbedaan antara pagu RAB dan pagu kontrak
16	Pengadaan dan Penebaran Benih Ikan	150,000	0	100	0	Kegiatan ditiadakan karena refocussing 100%.
17	Penanaman Bibit Mangrove	450,000	450,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
18	Penanaman Cemara Laut	450,000	450,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
19	Kegiatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	1,400,000	1,400,000	100	100	1. Realisasi fisik sudah 100 persen sesuai dengan perencanaan; 2. Kegiatan kebugaran jasmani dilaksanakn pada Bulan Januari, Maret, Juni, September dan Oktober; 3. Anggaran terserap 100 persen.
20	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	400,000	400,000	100	100	Realisasi fisik sudah 100 persen
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	5,678,500,000	4,943,758,557	100	87.06	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	5,678,500,000	4,943,758,557	100	87.06	
1	rapat koordinasi usaha petambak garam rakyat (2 kali)	12,055,000	10,605,000	100	87.97	tidak ada masalah, kegiatan telah dilaksanakan

						pada bulan september
2	pertemuan pemberdayaan usaha petambak garam rakyat (6 lokasi)	64,190,000	60,345,000	100	94.01	tidak ada permasalahan
3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	727,065,000	649,345,727	100	89.31	tidak ada permasalahan
4	pertemuan pemberdayaan usaha perempuan pesisir (8 lokasi)	85,075,000	82,029,330	100	96.42	kegiatan pertemuan rencananya akan dilaksanakan pada minggu kedua tanggal 14 bulan desember di Desa Mojo, Pemalang. Beberapa kegiatan mengalami kemunduran pelaksanaan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Tengah
5	pertemuan pemberdayaan usaha taruna pesisir (2 lokasi)	30,115,000	27,665,000	100	91.86	
6	Hibah Perekonomian (Sarpras Perempuan dan Taruna Pesisir)	755,000,000	590,248,000	100	78.18	tidak ada permasalahan, pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang diperkirakan
7	Hibah Perekonomian (Sarpras Petambak Garam)	4,005,000,000	3,523,520,500	100	87.98	tidak ada permasalahan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55,655,172,000	46,183,679,274	97.68	82.98	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	45,739,829,000	37,693,359,924	100	82.41	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **	128,460,000	128,460,000	100	100	
1	Penyusunan Dokumen Statistik Perikanan Tangkap Jawa Tengah	128,460,000	128,460,000	100	100	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **	35,088,719,000	28,475,770,666	100	81.15	
1	Asuransi Nelayan Jawa Tengah	3,622,005,000	3,352,005,000	100	92.55	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap money hasil pekerjaan
2	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan	20,175,000	20,175,000	100	100	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap money hasil

						pekerjaan
3	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Nelayan	20,205,000	20,205,000	100	100	
4	Penerapan SHTI di PPP	15,564,000	15,564,000	100	100	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap monev hasil pekerjaan
5	Penerapan ISO di PPP	13,005,000	13,005,000	100	100	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap monev hasil pekerjaan
6	Bantuan Operasional Penangkapan Ikan	12,336,625,000	10,160,330,664	100	82.36	-Dilakukan Transfer ke 666 Nelayan Penerima Bantuan BBM Nelayan pada bulan Desember 2021
7	Percepatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No 79 Tahun 2019	17,231,999,000	13,410,029,000	100	77.82	1. 5 Pekerjaan pembangunan sudah terlaksana 100% 2. kegiatan pendukung DAK sudah terlaksana 100%
8	Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Kenelayanan	1,829,141,000	1,484,457,002	100	81.16	1. Kegiatan sudah selesai dilaksanakan 100% 2. Sisa anggaran merupakan diluar perencanaan dan menjadi saving negara
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **	10,522,650,000	9,089,129,258	100	86.38	
1	Gerai Perijinan Kapal Perikanan (0-30 gt)	221,000,000	221,000,000	100	100	
2	Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan Menjadi Kewenangan Provinsi	5,900,000	5,600,000	100	94.92	
3	Tenaga Teknis Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan	128,700,000	128,700,000	100	100	
4	Sosialisasi Perijinan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	65,200,000	65,200,000	100	100	
5	Rapat Penerima Bantuan Hibah TA. 2018 dan 2019 dan Persiapan Bantuan Hibah 2021	62,400,000	55,400,000	100	88.78	
6	Sosialisasi SDI	8,250,000	8,250,000	100	100	
7	Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	5,170,000	5,170,000	100	100	
8	Maintenen Sistem E-Service	50,000,000	49,801,400	100	99.6	pekerjaan sudah selesai

9	Belanja Alat Tulis Kantor	26,875,000	26,540,000	100	98.75	
10	Coaching Klinik Petugas Cek Fisik Kapal	600,000	0	100	0	
11	Rapat Koordinasi Kegiatan PPI dan KAPI	21,850,000	21,850,000	100	100	pekerjaan sudah selesai
12	Cetak Blangko BPKP	37,500,000	35,785,000	100	95.43	
13	Cetak Blangko SIPI Andon	37,500,000	36,375,000	100	97	
14	Cetak Dokumen Kontrak	7,500,000	7,500,000	100	100	
15	Belanja Perjalanan Dinas	292,205,000	292,142,414	100	99.98	pekerjaan sudah selesai
16	Hibah Perekonomian (Sarpras Penangkapan)	130,000,000	130,000,000	100	100	pekerjaan sudah selesai
17	Hibah Perekonomian (Sarpras Penangkapan)	9,322,000,000	7,900,100,444	100	84.75	pekerjaan sudah selesai
18	Cetak Buku Kapal Perikanan (BKP)	100,000,000	99,715,000	100	99.72	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	9,915,343,000	8,490,319,350	87	85.63	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	5,987,881,000	5,952,965,852	100	99.42	
1	dukungan kegiatan untuk ketercapaian jumlah SPB	369,728,000	369,428,000	100	99.92	belanja modal pemasangan instalasi listrik tersisa 300000
2	Dukungan kegiatan untuk ketercapaian jumlah pelayanan perijinan	62,399,000	62,174,258	100	99.64	terdapat lebih anggaran di belanja asuransi kesehatan
3	SOSIALISASI	40,590,000	40,590,000	100	100	Kegiatan berupa pengawasan pada bulan desember telah terlaksana pada bulan desember 2021
4	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Wonokerto kelas B	342,975,000	340,950,000	100	99.41	
5	Honorarium Tenaga Non ASN	396,000,000	396,000,000	100	100	PPP Tasikagung memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder perikanan, salah satunya dalam pelayanan operasional kapal perikanan. Sebanyak kurang lebih 600 unit kapal penangkapan ikan melakukan bongkar muat dan tambat labuh di

						PPP Tasikagung. Untuk itu diperlukan SDM yang kompeten. Sementara jumlah ASN di PPP Tasikagung hanya 7 orang, sehingga dibutuhkan tenaga Non ASN untuk membantu dalam pelayanan kepelabuhanan tersebut
6	Dukungan kegiatan untuk ketercapaian jumlah pelayanan perijinan	91,097,000	91,017,000	100	99.91	
7	Honorarium Petugas Jaga Malam/Pas Masuk/Tambat Labuh/Pengadministrasi Umum/Tenaga Teknis	224,400,000	224,400,000	100	100	Honor non asn dibayarkan rutin setiap bulannya di setiap akhir taun, sesuai dengan jumlah non asn yang ada
8	ALAT TULIS KANTOR	5,790,000	5,790,000	100	100	Belanja ATK untuk mendukung kegiatan pelayanan yang ada di pelabuhan
9	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	195,040,000	195,035,509	100	100	Kegiatan secara fisik telah terlaksana dari tanggal 01 - 17 Desember 2021 baik untuk perdin ke wilayah timur maupun mengikuti rapat dan koordinasi ke kantor induk.
10	PERALATAN KERJA	45,200,000	45,200,000	100	100	
11	PENGGANDAAN	5,170,000	5,168,550	100	99.97	Kegiatan penggandaan dilakukan untuk mendukung kegiatan pelayanan di pelabuhan serta melakukan persiapan pembuatan buku tahunan dan SKM tahun 2021
12	ALAT TULIS KANTOR	13,739,000	13,739,000	100	100	Belanja ATK telah digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan di pelabuhan
13	Pendukung kegiatan untuk ketercapaian jumlah pelayanan perijinan	143,945,000	127,591,808	100	88.64	Serapan anggaran mencapai 88.64 % tetapi Output &

						Outcome kegiatan tercapai 100 % sehingga terdapat efisiensi anggaran
14	Rembug Gayeng PPP kidang Lor	10,000,000	10,000,000	100	100	
15	Penunjang Kegiatan Kantor	12,120,000	9,532,872	100	78.65	
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah SPB yang diterbitkan : 3300	47,232,000	47,207,119	100	99.95	kegiatan telah selesai dilaksanakan
17	Penunjang Kegiatan Kantor	263,840,000	263,840,000	100	100	
18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelayanan Perijinan : 165	244,200,000	244,200,000	100	100	kegiatan telah selesai dilaksanakan
19	Peningkatan sumber daya nelayan dalam pengoperasian alat tangkap ikan	18,552,000	18,300,000	100	98.64	
20	Peningkatan sumber daya nelayan dalam mengurus perijinan	20,770,000	20,770,000	100	100	
21	Kordinasi pemulihan ekonomi nelayan	36,110,000	35,755,000	100	99.02	
22	Belanja Perjalanan Dinas	10,301,000	10,200,000	100	99.02	
23	Honorarium Tenaga Kamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	574,200,000	574,200,000	100	100	
24	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133,570,000	133,231,197	100	99.75	Belanja perjalanan dinas dalam daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan undangan dan saat ini masih tersisa pagu anggaran Rp. 338.803,-
25	Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Suar	2,100,000	2,100,000	100	100	sudah terrealisasi 100%
26	Tenaga Teknis kepelabuhanan	165,000,000	165,000,000	100	100	sudah terealisasi sesuai kebutuhan
27	Belanja Alat Tulis Kantor	17,414,000	17,409,500	100	99.97	- penyerapan anggaran telah terealisasi 100% pembelian ATK telah terlaksana untuk Operasional kantor PPP Tegalsari dan ada sisa anggaran Rp. 4.500 nanti akan dikembalikan sisa UP
28	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi / Rapat	71,060,000	71,040,000	100	99.97	
29	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	12,500,000	12,192,000	100	97.54	

30	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	7,970,000	7,970,000	100	100	
31	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sarana dan Prasarana PPP Karimunjawa Kelas B	282,276,000	279,023,748	100	98.85	Kegiatan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Target
32	Belanja Perjalanan Dinas	13,450,000	12,846,500	100	95.51	Belanja sesuai kebutuhan
33	Belanja Alat Tulis Kantor	4,470,000	4,470,000	100	100	
34	Pemeliharaan saluran air bersih	12,750,000	12,750,000	100	100	
35	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa Kelas B	68,000,000	65,462,000	100	96.27	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana dan Prasarana PPP Karimunjawa Sudah di Laksanakan dan sesuai dengan Target
36	Asuransi Kesehatan	7,200,000	7,200,000	100	100	sudah terealisasi sesuai kebutuhan
37	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	62,766,000	62,652,600	100	99.82	Belanja perjalanan dinas dalam daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan undangan dan saat ini masih tersisa pagu anggaran Rp. 113.400,-
38	Honorarium Tenaga Keamanan/ Pengemudi/Tenaga Teknis (6 org 11 bln)	158,400,000	158,400,000	100	100	Realisasi Fisik dan Anggaran telah terlaksana 100% sesuai dengan kegiatan PPP Larangan
39	Belanja Alat Tulis Kantor	4,146,000	4,146,000	100	100	
40	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	7,080,000	7,080,000	100	100	Realisasi Fisik dan Anggaran untuk tahun 2021 telah terlaksana dengan baik tanpa setiap bulannya
41	Belanja Cetak	6,780,000	6,780,000	100	100	
42	Belanja Makanan dan Minuman	2,025,000	2,025,000	100	100	
43	Belanja Perjalanan Dinas	43,348,000	43,328,276	100	99.95	Perjalanan Dinas hingga Desember 2021 telah terlaksana dan anggaran telah terserap secara maksimal sesuai undangan yang

						ada
44	Alat tulis kantor	4,415,000	4,415,000	100	100	
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186,300,000	184,584,000	100	99.08	Sisa anggaran merupakan sisa kontrak
46	Peralatan Kerja K5	11,400,000	11,400,000	100	100	
47	Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	28,080,000	27,440,187	100	97.72	Belanja premi asuransi kesehatan non PNS dibayarkan rutin setiap bulannya, sesuai dengan jumlah 20 non asn dan 1 non asn yang tidak ikut karena harus membayar denda yang terlalu besar waktu ikut BPJS mandiri. dan ada pengembalian sebesar Rp. 639.813
48	Cetak blanko SPB, ABK , DU dan BLKK	3,000,000	3,000,000	100	100	Sudah terrealisasi 100%
49	Cetak blanko SPPD, kertas dan amplop kop	12,000,000	12,000,000	100	100	sudah terrealisasi 100%
50	Pencetakan buku statistik tangkap PPP Tegalsari	1,000,000	1,000,000	100	100	
51	Pencetakan buku laporan tahunan PPP Tegalsari	1,000,000	1,000,000	100	100	
52	Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,686,000	23,553,100	100	99.44	- penyerapan anggaran telah terealisasi 100% perjalanan dinas luar daerah dan ada sisa anggaran Rp. 132.900 nanti akan dikembalikan sisa UP
53	Koordinasi Operasional PPP Tegalsari (20 org x 1 kl x 12 bln)	8,000,000	8,000,000	100	100	Kegiatan koordinasi operasional PPP Tegalsari sudah terrealisasi dan selesai
54	kegiatan koordinasi karyawan dengan stakeholder terkait (30 orang, 16 kali)	6,600,000	6,600,000	100	100	- Belanja Makanan dan Minuman rapat koordinasi dengan stakeholder di gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan undangan ddan telah terrealisasi

						semua
55	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor	9,000,000	8,980,000	100	99.78	Belanja pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor sudah selesai dan masih tersisa anggaran sebesar Rp. 20.000,- dan sudah disetorkan
56	Pemeliharaan dan perawatan gedung dan Bangunan PPP Tegalsari	17,000,000	16,991,700	100	99.95	
57	Rehab Pos Pengawasan dan Pengecatan Kantor PPP Larangan	45,500,000	45,340,000	100	99.65	Sisa anggaran merupakan sisa kontrak
58	Cetak SPB	500,000	500,000	100	100	
59	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	300,000,000	299,316,000	100	99.77	
60	BELANJA JASA KONSULTASI	100,500,000	100,420,000	100	99.92	
61	PREMI ASURANSI	26,510,000	26,463,318	100	99.82	
62	Upah Tenaga Kerja Non PNS	363,000,000	363,000,000	100	100	
63	Pemeliharaan jaringan listrik	7,500,000	7,491,000	100	99.88	Belanja pemeliharaan jaringan listrik sudah selesai dan masih tersisa anggaran sebesar Rp. 9.000,- dan sudah disetorkan
64	MAKAN DAN MINUM	1,500,000	1,500,000	100	100	
65	PERJALANAN DINAS	11,977,000	11,973,510	100	99.97	Perjalanan dinas digunakan untuk pelayanan penerbitan SPB di daerah kragan dan sarang. sisa di bulan desember telah dilaksanakan untuk pelayanan di daerah timur sebanyak 1 kali
66	MAKAN DAN MINUM RAPAT	3,600,000	3,600,000	100	100	Kegiatan berupa monev WBK/WBBM telah terlaksana pada tanggal 20 Desember 2021
67	HONOR TENAGA NON PNS	198,000,000	198,000,000	100	100	Pemberian Honor untuk Non ASN sebanyak 6 orang
68	ALAT TULIS KANTOR	6,270,000	6,270,000	100	100	

69	Upah Piket	1,350,000	562,500	100	41.67	Realisasi Fisik telah selesai dikarenakan sesuai peraturan pemerintah untuk cuti bersama natal dan akhir tahun ditiadakan untuk menghindari peningkatan kasus Covid 19 dan penjagaan kantor dilaksanakan seperti biasa oleh penjaga malam, sehingga anggaran menjadi silva karena pelaksanaannya dibatalkan
70	Belanja Pemeliharaan	9,100,000	9,100,000	100	100	
71	Rehab Kios	210,300,000	209,375,000	100	99.56	
72	Perjalanan Luar Daerah	3,425,000	3,424,600	100	99.99	Sisa anggaran dari refocussing dan nominalnya terlalu kecil sehingga tidak bisa digunakan dan menjadi sisa
73	Honor Tenaga Teknis	33,000,000	33,000,000	100	100	Realisasi Fisik dan anggaran telah terlaksana 100% sesuai kegiatan PPP Larangan
74	Asuransi BPJS Kesehatan	1,440,000	1,440,000	100	100	Realisasi Anggaran dan Fisik telah terlaksana 100% sesuai kebutuhan PPP Larangan
75	Makan dan Minum	1,350,000	1,350,000	100	100	
76	Belanja Pemewliharaan	500,000	500,000	100	100	
77	Belanja Penggandaan	1,075,000	1,075,000	100	100	
78	Pavingisasi Jalan / Halaman Lingkungan Gedung Kantor Pelayanan PPP Klidang Lor	65,300,000	65,105,000	100	99.7	
79	Penataan Ruang Kantor Pelayanan	15,000,000	15,000,000	100	100	
80	Pendukung Kegiatan untuk ketercapaian jumlah SPB yang diterbitkan	14,000,000	14,000,000	100	100	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	3,927,462,000	2,537,353,498	67.19	64.61	
1	Dukungan kegiatan untuk peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	89,027,000	88,827,000	100	99.78	terdapat sisa anggaran belanja modal meja pengolahan sebesar 200.000

2	Dukungan kegiatan untuk peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	2,215,993,000	829,977,398	41.85	37.45	Pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Pengerukan Kolam Pelabuhan di PPP Wonokerto putus kontrak dengan prestasi pekerjaan sebesar 26,97%
3	Pelaksanaan Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	565,514,000	565,179,000	100	99.94	kegiatan telah selesai dilaksanakan
4	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	200,000,000	199,714,000	100	99.86	
5	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Perikanan (Tata Kelola dan Pelayanan Usaha)	61,016,000	60,983,300	100	99.95	kegiatan penunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan pengusahaan perikanan sudah selesai dan masih tersisa anggaran sebesar Rp. 32.700,- dan sudah disetorkan
6	Rembug Bakul	10,810,000	10,810,000	100	100	
7	Tenaga Teknis Kepelabuhan	132,000,000	132,000,000	100	100	
8	Belanja Perjalanan Dinas	50,565,000	50,482,000	100	99.84	Perjalanan dinas sudah dilakukan sesuai protokol kesehatan
9	Belanja Cetak	2,594,000	2,594,000	100	100	Pagu Belanja Cetak telah selesai terlaksana
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,400,000	48,400,000	100	100	Pagu anggaran perjalanan dinas untuk bulan desember diperkirakan habis (bahkan kurang), perjalanan dinas dilaksanakan pada saat mendesak saja
11	Dukungan Kegiatan untuk Peningkatan hasil Pemanfaatan lahan dan Fasilitas Usaha	156,000,000	154,952,000	100	99.33	
12	Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor PPP Tegalsari (Ruang Kerja dan Ruang Publik Lainnya)	40,000,000	39,795,800	100	99.49	
13	Honorarium Non PNS - Honorarium Tenaga Keamanan/ Kebersihan /Pengemudi/Tenaga Teknis	52,800,000	52,800,000	100	100	Realisasi Fisik dan Anggaran telah terlaksana 100% sesuai dengan kegiatan PPP Larangan tahun

						2021
14	Belanja Bahan Pakai Habis	2,295,000	2,295,000	100	100	
15	Belanja Premi Asuransi	2,640,000	2,640,000	100	100	Realisasi Fisik dan Anggaran telah terlaksana 100% sesuai dengan kegiatan PPP Larangan tahun 2021
16	Belanja Perjalanan Dinas	6,520,000	6,460,000	100	99.08	Realisasi fisik telah 100% dilaksanakan sesuai undangan yg ada dan anggaran telah digunakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perjalanan dinas
17	Belanja Pemeliharaan	4,110,000	4,110,000	100	100	
18	FGD Stakeholder (10 org 1 kali)	4,175,000	4,175,000	100	100	
19	Rembug Gayeng (30 org x 1 kl)	8,575,000	8,575,000	100	100	
20	Alat Tulis Kantor	1,832,000	1,832,000	100	100	
21	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000	15,000,000	100	100	kegiatan telah selesai dilaksanakan
22	Belanja Rehab Gedung Kantor PPP Klidang Lor	1,500,000	0	100	0	
23	Belanja Asuransi Kesehatan	6,600,000	6,600,000	100	100	Belanja sesuai kebutuhan
24	Belanja Alat Tulis Kantor	8,465,000	8,465,000	100	100	
25	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	8,381,000	8,381,000	100	100	
26	Belanja Asuransi Kesehatan	10,800,000	10,800,000	100	100	Belanja Asuransi kesehatan non asn dibayarkan rutin setiap bulannya. - Untuk bulan desember sisa pagu anggaran tidak cukup untuk membayar jumlah tagihan BPJS
27	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	6,750,000	6,750,000	100	100	
28	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	300,000	300,000	100	100	
29	PERALATAN KERJA	7,100,000	7,100,000	100	100	
30	PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS	16,000,000	16,000,000	100	100	

31	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	4,800,000	4,800,000	100	100	Pembayaran jasa pengangkutan sampah di PPP Asemdayong dibayarkan rutin setiap bulannya
32	BELANJA BARANG DAN JASA	186,900,000	186,556,000	100	99.82	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	26,035,758,000	16,465,680,300	99.87	63.24	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	211,549,000	200,779,000	100	94.91	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan **	114,947,000	105,677,000	100	91.94	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (10 unit))	10,900,000	9,850,000	100	90.37	Sertifikasi CBIB tergantung pada permohonan dari unit pembesaran ikan di kab./kota
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4,302,000	4,302,000	100	100	Realisasi belanja ATK sesuai dengan kebutuhan
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,000,000	23,880,000	100	74.63	Sertifikasi CPIB tergantung pada permohonan unit perbenihan ikan di kab/kota
4	Belanja Bahan Makanan Ternak	1,275,000	1,275,000	100	100	Uji pakan mandiri telah dilaksanakan 100% untuk 3 unit Pokpari
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,470,000	8,370,000	100	98.82	Pada bulan ini dilaksanakan penilaian CPPIB pada 3 unit pembuatan pakan
6	Belanja Benih	58,000,000	58,000,000	100	100	Benih untuk stakeholder tergantung pada proposal/permintaan dari stakeholder terkait bidang perikanan
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan **	96,602,000	95,102,000	100	98.45	
1	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	9,000,000	7,500,000	100	83.33	Kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Budidaya Semester 2 telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 Desember 2021 dengan

						Narasumber dari pusat
2	Belanja Penggandaan	19,350,000	19,350,000	100	100	Buku Statistik Perikanan Budidaya Jawa Tengah tahun 2020 selesai dicetak pada tanggal 18 Desember 2021
3	Belanja Alat Tulis Kantor	5,252,000	5,252,000	100	100	Realisasi ATK sesuai dengan kebutuhan
4	Honorarium Pelaksana Kegiatan	63,000,000	63,000,000	100	100	Honor Petugas Data Statistik Perikanan Budidaya Jawa Tengah diberikan setelah kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Perikanan Budidaya Jawa Tengah semester 2
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	25,824,209,000	16,264,901,300	99.86	62.98	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	2,864,430,000	2,844,053,065	100	99.29	
1	Pemeliharaan Bak/Kolam/Tambak dalam rangka mendukung Operasional Budidaya	16,000,000	16,000,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pemeliharaan kolam/bak
2	Pengadaan BBM/Gas dalam rangka Operasional Budidaya	32,000,000	32,000,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pembelian bbm.
3	Pengadaan Pakan dalam rangka Operasional Budidaya	961,460,000	957,256,000	100	99.56	telah selesai dilakukan kegiatan pengadaan pakan
4	Pengadaan Bahan Kimia dan Pupuk dalam rangka Operasional Budidaya	215,000,000	214,933,500	100	99.97	telah selesai dilakukan kegiatan pembelian bahan kimia
5	Pengadaan Peralatan Kerja Dalam Rangka Operasional Budidaya	60,000,000	60,000,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pembelian peralatan kerja
6	Belanja Alat Tulis Kantor	8,304,000	8,304,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pembelian belanja ATK
7	Belanja Penggandaan	1,500,000	1,500,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan penggandaan

8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84,825,000	83,136,835	100	98.01	telah selesai dilakukan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,977,000	8,826,000	100	98.32	telah selesai dilakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah
10	Pemeliharaan Electric Generating Set dalam rangka Mendukung Operasional Budidaya	40,000,000	39,972,000	100	99.93	telah selesai dilakukan kegiatan pemeliharaan mesin/genset
11	Peningkatan Promosi dan Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Usaha dan Jasa	30,000,000	29,700,000	100	99	telah selesai dilakukan kegiatan pengadaan sarpras pendukung
12	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	927,300,000	927,300,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pembayaran honorarium
13	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	40,464,000	27,708,480	100	68.48	telah selesai dilakukan kegiatan pembayaran BPJS dan hingga saat ini hanya membayarkan 20 tenaga honor yang ikut BPJS kantor dari 32 tenaga honor yang dianggarkan
14	Pengadaan Benih/Induk Ikan dalam rangka Operasional Budidaya	336,600,000	335,526,250	100	99.68	telah selesai dilakukan kegiatan pengadaan benih
15	Belanja Pengadaan Genset	77,000,000	76,890,000	100	99.86	pengadaan genset menggunakan sistem kontrak dan akan selesai pada pertengahan bulan Desember
16	Belanja Pengadaan Kincir	25,000,000	25,000,000	100	100	telah selesai dilakukan kegiatan pembelian pengadaan kincir
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	19,071,115,000	9,682,140,894	99.82	50.77	
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	252,900,000	107,900,000	100	42.67	Honor untuk tim teknis maupun konsultan pendamping kegiatan hibah diberikan ketika laporan kegiatan hibah telah

						disampaikan kepada DKP Prov Jateng
2	Uang Harian Peserta Kegiatan	98,000,000	29,200,000	100	29.8	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/temu lapang kegiatan hibah telah dilaksanakan melalui proses ketat serta pembatasan peserta sesuai dengan level PPKM sehingga membuat jumlah peserta menjadi berkurang jauh
3	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	600,000	600,000	100	100	Spanduk untuk kegiatan temu lapang maupun rapat koordinasi minapadi sudah direalisasikan semua
4	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	32,250,000	25,200,000	100	78.14	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/temu lapang kegiatan hibah telah dilaksanakan melalui proses ketat serta pembatasan peserta sesuai dengan level PPKM sehingga membuat jumlah peserta menjadi berkurang jauh
5	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	13,500,000	13,500,000	100	100	Kegiatan sosialisasi maupun temu lapang hibah telah dilaksanakan seluruhnya
6	Belanja Penggandaan	35,750,000	29,250,000	100	81.82	Dokumen kontrak pengadaan sudah selesai digandakan dan dijilid semua
7	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9,700,000	1,400,000	100	14.43	Sewa ruang hanya digunakan pada pertemuan hibah minapadi maupun nila salin
8	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	28,500,000	28,500,000	100	100	Belanja Makanan dan minuman hanya digunakan untuk kegiatan sosialisasi/temu lapang/koordinasi

						hibah
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	453,640,000	360,257,894	100	79.41	Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan kebutuhan kegiatan sesuai perencanaan
10	Belanja Hibah Bidang Perekonomian (Sarpras Budidaya)	640,000,000	545,000,000	100	85.16	Hibah uang telah dicairkan ke kelompok dan saat ini dalam proses pembelanjaan sesuai RAB
11	Hibah Perekonomian (Sarpras Budidaya)	17,296,000,000	8,366,068,000	100	48.37	Hibah barang bidang perikanan telah diserahkan ke seluruh kelompok penerima hibah sesuai dengan SK Gubernur namun terdapat kelompok yang sudah menerima bantuan dari APBD II maupun APBN sehingga tidak dapat diberikan bantuan
12	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35,000,000	0	0	0	Hibah Bansarpras Pondok Pesantren tidak membutuhkan konsultan perencanaan maupun pengawas karena bukan pekerjaan konstruksi
13	Belanja Alat Tulis Kantor	37,515,000	37,505,000	100	99.97	Belanja ATK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
14	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	132,000,000	132,000,000	100	100	Realisasi honor tenaga teknis disesuaikan dengan pengajuan
15	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non ASN	5,760,000	5,760,000	100	100	Pembayaran BPJS Kesehatan sesuai dengan pengajuan anggaran tiap bulan
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	3,888,664,000	3,738,707,341	100	96.14	
1	Pengadaan Pakan Larva/Benih Ikan	330,600,000	305,322,000	100	92.35	Target keuangan pengadaan pakan benih sd Bulan Desember Rp.

						330.600.000,- dengan realisasi sd Bulan Desember Rp. 305.322.000,- sehingga ada deviasi negatif sebesar -7.65 . Hal ini disebabkan sisa kontraktual yang disesuaikan dengan kebutuhan unit penunjang.
2	Pengadaan Induk Ikan	98,600,000	98,000,000	100	99.39	Target keuangan sd Bln. Desember Rp. 98.600,000,- dgn realisasi sd Bulan Desember Rp. 98.000.000,-. sehingga ada deviasi negatif sebesar - 0.61. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,444,000	2,444,000	100	100	
4	Pengadaan Pakan Induk	291,995,000	291,633,110	100	99.88	Target keuangan pengadaan pakan induk sd desember Rp. 291.995.000,- dengan realisasi sd desember Rp. 291.633.110,- sehingga ada deviasi negatif sebesar - 0,12. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
5	Pengadaan Calon Induk	53,100,000	50,380,000	100	94.88	Target keuangan pengadaan calon induk sd desember Rp. 53.100.000,- dengan realisasi sd desember Rp.50.380.000,- sehingga ada deviasi negatif - 5.12. Hali ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
6	Pengadaan Bahan Kimia dan Pupuk	121,875,000	121,052,000	100	99.32	Target keuangan pengadaan bahan kimia dan pupuk sd desember Rp. 121.875.000 dengan realisasi sd desember Rp.

						121.052.000 sehingga ada deviasi negatif - 0.68. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
7	Pelayanan Administrasi kegiatan	1,596,466,000	1,489,276,000	100	93.29	Target keuangan Pelayanan Administrasi Kegiatan sd Desember Rp. 1.596.466.000 dengan realisasi sd desember Rp. 1.489.276.000 sehingga ada deviasi negatif - 6.71 . Hal ini disebabkan pembayaran honor tenaga teknis dan premi BPJS dibayarkan sesuai dengan SK penetapan dimana terdapat tenaga teknis SMP, D3 dan S1 yang mengundurkan diri karena lolos seleksi CPNS.
8	Belanja Bahan Pakai Habis	5,659,000	5,659,000	100	100	Kegiatan sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
9	Peralatan Kerja Pembenihan Ikan	26,100,000	26,016,925	100	99.68	Target keuangan peralatan kerja pembenihan sd Desember Rp. 26.100.000 dengan realisasi sd Desember Rp. 26.016.925 sehingga ada deviasi negatif - 0.32. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
10	Monitoring Peredaran Obat Ikan	8,590,000	8,590,000	100	100	
11	Audit Internal ISO 17025	425,000	425,000	100	100	Kegiatan sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
12	Uji Banding	13,925,000	13,925,000	100	100	Kegiatan sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik

13	Monitoring Hama Penyakit Ikan	35,780,000	35,779,000	100	100	Kegiatan sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
14	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000	5,500,000	100	100	
15	Reakreditasi ISO 17025	35,825,000	35,777,500	100	99.87	Kegiatan sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
16	Pengadaan Media dan Reagen	1,025,000	1,025,000	100	100	Kegiatan Sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
17	Pengadaan Peralatan Laboratorium	100,300,000	99,946,000	100	99.65	Kegiatan Sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
18	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	24,000,000	24,000,000	100	100	Kegiatan Sudah Terselesaikan keuangan maupun fisik
19	Peralatan Kerja Pembesaran Ikan	22,000,000	21,683,200	100	98.56	Target keuangan peralatan kerja pembesaran ikan Rp. 22.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.683.200 sehingga ada deviasi negatif - 0,78. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
20	Belanja Modal	265,640,000	263,568,000	100	99.22	Target keuangan belanja modal sd desember Rp. 265.640.000,- dengan realisasi sd desember Rp. 263.568.000 sehingga ada deviasi negatif - 0.78. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan kontraktual
21	Pelayanan Administrasi Kegiatan	608,465,000	599,273,000	100	98.49	1,5 % tidak dapat terealisasi yaitu honor dan asuransi non asn dikarenakan meninggal dunia
22	Publikasi Media Elektronik	12,000,000	12,000,000	100	100	Kegiatan publikasi dilaksanakan 12 kali dalam setahun
23	Kaji Ulang Manajemen	425,000	425,000	100	100	Kegiatan telah terlaksana secara

						keuangan maupun fisik
24	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	7,500,000	7,500,000	100	100	
25	Uji Profisiensi	105,425,000	105,063,000	100	99.66	
26	Kalibrasi dan Perawatan Peralatan Pengujian	15,000,000	15,000,000	100	100	Kegiatan telah terlaksana secara keuangan maupun fisik
27	Belanja Modal Rehab Gedung Laboratorium	100,000,000	99,444,606	100	99.44	Bangunan fisik telah tercapai 100% meskipun realisasi keuangan 99,4 % karena anggaran sisa dari kontraktual.
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,771,464,000	2,652,173,534	100	95.7	
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	2,538,553,000	2,432,776,034	100	95.83	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil **	1,233,135,000	1,131,317,000	100	91.74	
1	Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Prov Jateng	77,900,000	70,260,000	100	90.19	kegiatan telah dilaksanakan
2	Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Prov Jateng	347,770,000	347,563,000	100	99.94	kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal
3	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	33,800,000	29,950,000	100	88.61	kegiatan telah dilaksanakan
4	Hibah Perekonomian (Sarpras Pengawasan SDKP)	754,820,000	664,699,000	100	88.06	kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal
5	Koordinasi tertib perundangan pada usaha pembudidaya ikan	18,845,000	18,845,000	100	100	kegiatan telah dilaksanakan
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil **	1,305,418,000	1,301,459,034	100	99.7	
1	Operasi Pengawasan Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	36,505,000	36,505,000	100	100	Operasi pengawasan serta pembayaran honorarium sudah dilaksanakan
2	Pendukung Administrasi Sub Kegiatan Pengawasan Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	390,371,000	386,967,684	100	99.13	1. Akumulasi Realisasi fisik sama dengan Perencanaan sampai Bulan Desember 2021; 2. Realisasi fisik merupakan pembayaran honor staff non ASN Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat; 3.

						Sisa keuangan perjalanan dinas merupakan sisa kegiatan.
3	Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan	54,750,000	54,702,850	100	99.91	Pemeliharaan kapal telah selesai dilaksanakan keseluruhan
4	Operasi Pengawasan (10 orang x 15 lokasi x 1 keg)	98,000,000	97,820,000	100	99.82	Kegiatan telah dilaksanakan
5	Operasi Pengawasan Laut (8 kali)	29,100,000	29,100,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
6	Honorarium Non PNS	183,600,000	183,600,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
7	Belanja ATK Kantor	2,657,000	2,657,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
8	Bahan Bakar Kapal Pengawas untuk Operasi Pengawasan (10 kali)	15,000,000	15,000,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
9	Bahan Bakar Kapal Pengawas Untuk Pemanasan Harian	2,960,000	2,960,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
10	Bahan Bakar Minyak/Gas	10,000,000	10,000,000	100	100	Kegiatan sudah dilaksanakan
11	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	6,490,000	6,490,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
12	Belanja Penggandaan	215,000	215,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
13	Perjalanan Koordinasi, Konsultasi, dan Undangan (24 jam) (3 org x 1 hari x 30 kali)	51,910,000	51,910,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai

						jadwal pelaksanaan
14	Pemeliharaan Kapal Pengawasan	26,000,000	26,000,000	100	100	Realisasi keuangan masih dibawah target karena LPJ akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2021
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,460,000	128,335,000	100	99.9	Kegiatan sudah dilaksanakan
16	Perjalanan Dinas Mediasi/Konflik Nelayan (2 orang x 5 kali)	5,290,000	5,200,000	100	98.3	Kegiatan telah dilaksanakan
17	Perjalanan Menghadiri Undangan/Koordinasi Provinsi/Pembinaan Kab/Kota (3 orang x 1 hari x 20 kali)	37,360,000	37,256,500	100	99.72	Kegiatan telah dilaksanakan
18	Dukungan Administrasi	204,600,000	204,600,000	100	100	Kegiatan telah dilaksanakan
19	Pemberdayaan Pokmaswas (1 kali x 1 hari)	14,100,000	14,100,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai jadwal pelaksanaan
20	Koordinasi Operasi Pengawasan	8,050,000	8,040,000	100	99.88	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	232,911,000	219,397,500	100	94.2	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	101,164,000	96,817,500	100	95.7	
1	Pembinaan Pokmaswas	9,900,000	7,350,000	100	74.24	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Juni 2021; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa kegiatan; 3. Kegiatan Pokmaswas sesuai kebutuhan dalam pencapaian target.
2	Pendukung Administrasi Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	2,774,000	2,374,000	100	85.58	Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Juni 2021

3	Perjalanan Koordinasi, Konsultasi, dan Undangan (24 jam) (3 org x 1 hari x 6 kali)	2,850,000	2,850,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
4	Operasi Pengawasan PUD (3 kali)	20,140,000	20,140,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
5	Dukungan Administrasi	15,313,000	14,672,000	100	95.81	Kegiatan telah dilaksanakan
6	Monitoring Usaha Hasil Perikanan (5 orang x 1 hari x 12 kali)	13,100,000	13,079,500	100	99.84	Kegiatan telah dilaksanakan
7	Pengawasan Budidaya Perikanan (5 orang x 12 lokasi x 1 kali)	15,327,000	15,192,000	100	99.12	Kegiatan telah dilaksanakan
8	Perjalanan dalam rangka Identifikasi/Monitoring/Evaluasi dan Koordinasi Unit Usaha Perikanan Tangkap (4 orang x 12 lokasi x 1 kali)	21,760,000	21,160,000	100	97.24	Kegiatan telah dilaksanakan
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **	16,523,000	14,387,500	100	87.08	
1	Pendukung Administrasi Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	16,523,000	14,387,500	100	87.08	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Oktober 2021.; 2. Sisa anggaran merupakan efisiensi kegiatan
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **	115,224,000	108,192,500	100	93.9	
1	Pendukung Administrasi Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8,684,000	6,914,000	100	79.62	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Juni 2021; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa anggaran.
2	Pengadaan Barang untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan	10,000,000	9,997,500	100	99.98	1. Realisasi fisik sudah 100 persen pada Bulan Juni 2021; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa kegiatan.
3	sosialisasi larangan penggunaan formalin pada produk hasil perikanan	70,000,000	64,741,000	100	92.49	kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

						ditentukan
4	Rakor CDK Wilayah Selatan (1 kali x 1 hari)	15,975,000	15,975,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
5	Kegiatan sosialisasi/pelatihan/rakor	265,000	265,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
6	Perjalanan koordinasi, konsultasi, dan undangan (24 jam) (3 org x 1 hari x 11 kali)	10,300,000	10,300,000	100	100	Target indikator pada triwulan keempat telah tercapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7,101,884,000	5,858,963,150	100	82.5	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	95,660,000	94,460,000	100	98.75	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **	95,660,000	94,460,000	100	98.75	
1	Uang Harian Peserta Kegiatan	3,500,000	2,300,000	100	65.71	Kegiatan pertemuan statistik pengolahan semester II dilaksanakan di bulan Desember secara luring yang dihadiri oleh 23 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	150,000	150,000	100	100	
3	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	2,625,000	2,625,000	100	100	
4	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	8,000,000	8,000,000	100	100	
5	Belanja Cetak	7,500,000	7,500,000	100	100	
6	Belanja Penggandaan	800,000	800,000	100	100	
7	Belanja Fullday meeting	2,500,000	2,500,000	100	100	
8	Honor Petugas Pengumpul Data Pendataan Pengolahan	63,000,000	63,000,000	100	100	
9	Belanja ATK Pendataan Pengolahan	7,585,000	7,585,000	100	100	

	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	7,006,224,000	5,764,503,150	100	82.28	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **	5,151,610,000	4,002,306,450	100	77.69	
1	Pengujian Laboratoris Produk Hasil Perikanan	1,231,750,000	1,197,070,962	100	97.18	Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan
2	Belanja Alat Tulis Kantor	23,648,000	23,648,000	100	100	
3	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	3,960,000	2,880,000	100	72.73	Dalam DPA anggaran untuk BPJS Non ASN berjumlah 3 orang sedangkan jumlah Non ASN pada seksi yang mengikuti BPJS berjumlah 2 orang
4	Uang Harian Peserta Kegiatan	161,800,000	79,950,000	100	49.41	- Kegiatan pembinaan kelompok telah dilaksanakan di 35 kabupaten/kota; - Kegiatan PEM telah dilaksanakan; - Honor pembina mutu kabupaten/kota hanya diterimakan kepada pembina mutu di 27 kabupaten/kota penerima hibah
5	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	29,475,000	29,475,000	100	100	
6	Belanja Cetak	7,000,000	7,000,000	100	100	
7	Belanja Penggandaan	1,997,000	1,997,000	100	100	
8	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	146,750,000	56,075,000	100	38.21	- Belanja makan dan minum peserta kegiatan tidak terserap karena adanya pembatasan peserta kegiatan selama pandemi covid; - Belanja makan dan minum peserta kegiatan meliputi kegiatan pembinaan kelompok dan pembangkitan ekonomi

9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	349,630,000	264,444,600	100	75.64	Perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan selektif dikarenakan pandemi Covid 19. Perjalanan dinas meliputi pembinaan dan pendampingan pada kelompok, pembinaan menuju pra SKP, Pembangkitan Ekonomi, dan pendampingan hibah peralatan pengolahan dan kemasan
10	Honor Belanja Non ASN	99,000,000	99,000,000	100	100	
11	Alat Peraga/Bahan Praktek/ Pelatihan Pembinaan Kelompok	73,000,000	67,309,100	100	92.2	Belanja alat peraga pembinaan kelompok menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana dari narasumber
12	Belanja Hibah Peralatan Pertanian/Peternakan/Perikanan	2,976,000,000	2,126,606,788	100	71.46	- Hibah peralatan pengolahan telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota dan hibah kemasan olahan hasil perikanan di 24 kabupaten/kota akan menjadi potensi silpa karena dalam DPA dianggarkan untuk 35 kabupaten/kota; - Hibah dilaksanakan secara lelang dan penunjukan langsung sehingga pihak ketiga melakukan penawaran dibawah harga yang ada di DPA
13	Honor narasumber akademisi/ahli/praktisi pembinaan kelompok	47,000,000	46,250,000	100	98.4	Narsum kegiatan PEM hanya dihadiri oleh 5 orang sedangkan dianggarkan untuk 6 orang
14	Publikasi potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jawa Tengah	600,000	600,000	100	100	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan	1,854,614,000	1,762,196,700	100	95.02	

	Berdaya Saing **					
1	Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan	80,230,000	80,089,000	100	99.82	Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan
2	Jumlah SKP yang dikeluarkan	149,384,000	145,591,700	100	97.46	Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan
3	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	5,250,000	5,250,000	100	100	
4	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	1,360,890,000	1,279,226,000	100	94	- Belanja paket Gemarikan dibawah pagu anggaran karena dilaksanakan secara PL; - Pendistribusian paket Gemarikan telah dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah;
5	Belanja Penggandaan	8,020,000	1,200,000	100	14.96	Laporan untuk kegiatan Gemarikan yang awalnya untuk 35 kabupaten/kota dialokasikan menjadi laporan kegiatan
6	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	72,000,000	72,000,000	100	100	
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128,090,000	128,090,000	100	100	
8	Belanja Cetak	35,000,000	35,000,000	100	100	
9	Belanja Honor non PNS	15,750,000	15,750,000	100	100	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan, meliputi :

a. Kas di Kas Daerah

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) dan sisa ganti uang (GU) serta sisa tambah uang (TU) yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran. Kas Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerima merupakan kas yang menjadi tanggung jawab oleh bendahara penerima yang berasal dari pendapatan retribusi dan penerimaan lain-lain yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas dibendahara penerima diakui pada saat menerima pendapatan atau menyetor ke Kas Daerah berdasarkan nilai nominal.

d. Tanah

Diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung sampai dengan siap untuk digunakan. Sedangkan biaya ini meliputi harga beli atau konstruksi dan biaya lainnya.

g. Pendapatan

Pendapatan disini meliputi pemanfaatan aset daerah secara optimal, yakni pemakaian kekayaan daerah, penjualan produk daerah, retribusi perijinan dan pendapatan lain yang sah.

h. Belanja

Meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14.432.102.248,00 atau 135,09% dari target Rp 10.683.550.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 14.591.849.381,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	10.683.550.000	14.432.102.248	135,09	14.591.849.381
Jumlah	10.683.550.000	14.432.102.248	135,09	14.591.849.381

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14.432.102.248 atau 133,99% dari target Rp 10.683.550.000 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 14.591.849.381,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Retribusi daerah	10.683.550.000	14.314.836.492	133,99	14.481.761.039
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	117.265.756	100	110.088.342
Jumlah	10.683.550.000	14.432.102.248	133,99	14.591.849.381

5.1.1.1.1.1. Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14.314.836.492,00 atau 133,99% dari target Rp 10.683.550.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 14.481.761.039,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Usaha	8.383.550.000	11.498.458.792	137,16%	10.013.851.139
Retribusi Perizinan Tertentu	2.300.000.000	2.816.377.700	122,45%	4.467.909.900
Jumlah	10.683.550.000	14.314.836.492	133,99%	14.481.761.039

5.1.1.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 11.498.458.792,00 atau 137,16% dari target Rp 8.383.550.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.013.851.139,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.048.550.000	4.277.056.448	140,30	2.899.228.949
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.695.000.000	5.532.632.500	149,73	5.827.626.900
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.640.000.000	1.688.769.844	102,97	1.286.995.290
Jumlah	8.383.550.000	11.498.458.792	137,16%	10.013.851.139

5.1.1.1.1.1.1.1. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.816.377.700,00 atau 122,45 % dari target Rp 2.300.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.467.909.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Usaha Perikanan	2.300.000.000	2.816.377.700	122,45	4.467.909.900
Jumlah	2.300.000.000	2.816.377.700	122,45	4.467.909.900

5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 117.265.756,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 110.088.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Denda Retribusi	-	117.265.756	100	110.088.342
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	117.265.756	100	110.088.342

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 99.988.474.582,00 atau 84,14% dari anggaran Rp 118.838.848.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 70.372.105.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	35.289.538.000	32.920.883.912	93,29	45.931.232.862
Belanja Barang & Jasa	47.670.490.000	43.221.347.938	90,67	24.440.872.873
Belanja Hibah	35.878.820.000	23.846.242.732	66,46	-
Jumlah	118.838.848.000	99.988.474.582	84,14	70.372.105.735

Belanja Pegawai tidak mencapai target dikarenakan terdapat banyak pegawai yang pensiun Tahun 2021, tetapi anggaran tidak kami kurangi, selain itu tunjangan PPh yang dinaikkan 13x dikarenakan untuk antisipasi kekurangan tunjangan PPh.

Belanja Barang dan Jasa tidak mencapai target dikarenakan sisa belanja barang dan jasa karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemik, selain itu sisa belanja jasa konsultansi karena ada beberapa pekerjaan konstruksi yg terefocusing.

Belanja hibah tidak mencapai target dikarenakan belanja hibah dilaksanakan sesuai SK Gubernur yang berlaku dan ada beberapa kelompok penerima hibah yg tidak lolos verifikasi.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 32.920.883.912,00 atau 93,29% dari anggaran Rp 35.289.538.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 45.931.232.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.733.718.000	16.268.521.515	97,22
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.555.820.000	16.652.362.397	89,74
Jumlah	35.289.538.000	32.920.883.912	93,29

Belanja Pegawai tidak mencapai target dikarenakan terdapat banyak pegawai yang pensiun Tahun 2021, tetapi anggaran tidak kami kurangi, selain itu tunjangan PPh yang dinaikkan 13x dikarenakan untuk antisipasi kekurangan tunjangan PPh.

5.1.2.1.1.1.Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 43.221.347.938,00 atau 90,67% dari anggaran Rp 47.670.490.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 24.440.872.873,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang	6.047.042.000	5.846.523.599	96,68
Belanja Jasa	22.879.905.000	21.188.631.222	92,61
Belanja Pemeliharaan	1.778.229.000	1.749.520.578	98,39
Belanja Perjalanan Dinas	4.573.726.000	4.290.178.875	93,80
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.391.588.000	10.146.493.664	81,88
Jumlah	47.670.490.000	43.221.347.938	90,67

Belanja Barang dan Jasa tidak mencapai target dikarenakan sisa belanja barang dan jasa karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemik, selain itu sisa belanja jasa konsultansi karena ada beberapa pekerjaan konstruksi yg terefocusing.

5.1.2.1.1.1. Belanja Hibah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 23.846.242.732,00 atau 66,46% dari anggaran Rp 35.878.820.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.878.820.000	23.846.242.732	66,46	0
Jumlah	35.878.820.000	23.846.242.732	66,46	0

Belanja hibah tidak mencapai target dikarenakan belanja hibah dilaksanakan sesuai SK Gubernur yang berlaku dan ada beberapa kelompok penerima hibah yg tidak lolos verifikasi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 18.178.051.653,00 atau 77,67% dari anggaran Rp 23.403.550.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.225.838.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Peralatan dan Mesin	1.014.207.000	1.008.128.500	99,40	1.055.630.000
Belanja Gedung dan Bangunan	22.164.343.000	16.945.509.153	76,45	816.419.800
Belanja Jalan, jaringan, dan irigasi	225.000.000	224.414.000	99,74	2.353.788.200
Jumlah	23.403.550.000	18.178.051.653	77,67	4.225.838.000

Belanja Modal tidak mencapai target dikarenakan terdapat sisa tender dari belanja modal gedung dan bangunan, selain itu terdapat putus kontrak pada belanja modal yg nilainya besar.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.008.128.500,00 atau 99,40% dari anggaran Rp 1.014.207.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.055.630.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Alat Besar	102.000.000	101.890.000	99,89
Belanja Alat Angkutan	30.000.000	29.700.000	99,00
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.200.000	1.200.000	100
Belanja Alat Pertanian	65.000.000	64.800.000	99,69
Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	157.190.000	156.328.000	99,45
Belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.800.000	3.800.000	100
Belanja Alat Laboratorium	325.300.000	320.853.500	98,63
Belanja Komputer	329.717.000	329.557.000	99,95
Jumlah	1.014.207.000	1.008.128.500	99,40

5.1.2.2.1.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 16.945.509.153,00 atau 76,45% dari anggaran Rp 22.164.343.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 816.419.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung Tempat Kerja	22.164.343.000	16.945.509.153	76,45	816.419.800
Jumlah	22.164.343.000	16.945.509.153	76,45	816.419.800

Belanja Modal tidak mencapai target dikarenakan terdapat sisa tender dari belanja modal gedung dan bangunan.

5.1.2.2.1.1.1. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 224.414.000,00 atau 99,74% dari anggaran Rp 225.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.353.788.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Bangunan Air	200.000.000	199.714.000	99,86
Belanja Instalasi	25.000.000	24.700.000	98,80
Jumlah	225.000.000	224.414.000	99,74

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp 103.734.423.987,00) sedangkan Tahun 2020 sebesar (Rp 60.006.094.354,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.280.247.673,77 naik sebesar Rp2.164.555.791,23 atau 0,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp363.115.691.882,44, dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Aset Lancar	1.202.958.845,82	1.258.335.018,34
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	362.665.306.373,25	358.145.543.526,89
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	1.411.982.454,70	3.711.813.337,31
Jumlah	365.280.247.673,77	363.115.691.882,44

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.202.958.845,82 turun sebesar Rp55.376.172,52 atau 4,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.258.335.018,34

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 turun sebesar Rp30.640.400,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.30.460.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Kas di Bendahara Penerimaan	-	30.460.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	30.460.400,00

5.2.1.1.1.1 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp - masih sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp - dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718	4.105.302.718
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(4.105.302.718)	(4.105.302.718)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	-	-

Penjelasan Mutasi Piutang Lainnya

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Piutang TPI	4.105.302.718	-	4.105.302.718	-
	Jumlah	4.105.302.718	-	4.105.302.718	-

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 4.105.302.718,-) berkurang dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 4.105.302.718,-) dengan rincian sebagai berikut :

	2021		2020	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
lancar	-	-	-	-
menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
menunggak 2-3 tahun	-	-	-	-
menunggak 3-5 tahun	-	-	-	-

menunggak lebih dari 5 tahun	4.105.302.718,00	(4.105.302.718,00)	4.105.302.718,00	(4.105.302.718,00)
Jumlah	4.105.302.718,00	(4.105.302.718,00)	4.105.302.718,00	(4.105.302.718,00)

5.2.1.1.1.1 Belanja Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 114.357.138,10 Naik sebesar Rp 22.814.026,76 atau 24,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 91.543.111,34,- dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Asuransi BMD	114.357.138,10	91.542.111,34,-
Jumlah	114.357.138,10	91.542.111,34,-

5.2.1.1.1.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.088.601.707,72 ada penurunan sebesar Rp 47.729.799,28 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.136.331.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Persediaan Bahan	322.179.818,50	1.136.331.507
Persediaan Habis Pakai	569.614.464,22	-
Persediaan Obat-Obatan	6.978.000,00	-
Persediaan Pakan	189.829.425,00	-
Jumlah	1.088.601.707,72	1.136.331.507

5.2.1.1. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp362.665.306.373,25 naik sebesar Rp4.519.762.846,36 atau 1,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp358.145.543.526,89 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Tanah	169.159.491.160,00	169.159.491.160,00
Peralatan dan Mesin	51.754.153.516,00	48.650.850.402,00
Gedung dan Bangunan	92.298.165.018,00	94.357.733.572,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	166.109.001.808,00	148.053.772.601,00
Aset Tetap Lainnya	512.347.698,00	512.347.698,00

Konstruksi dalam Pengerjaan	1.207.451.350,00	567.849.200,00
Akumulasi Penyusutan	(118.375.304.176,75)	(103.156.501.106,11)
Jumlah	362.665.306.373,25	358.145.543.526,89

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari:

Saldo Awal	Rp 358.145.543.526,89
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 18.178.051.653,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 9.238.514,00
Hibah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp -
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp 31.390.894.546,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp 758.166.000,00
Koreksi	Rp 1.381.480.000,00
Jumlah	Rp 51.717.830.713,00
Pelepasan	
Ekstrakomtable	Rp 87.890.250,00
Mutasi Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp 31.390.894.546,00
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp 460.000.000,00
Koreksi Belanja Modal	Rp -
Koreksi Belanja Hutang	Rp -
Koreksi Tahun Lalu	Rp 40.480.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 118.375.304.176,75
Jumlah	Rp 150.354.568.972,75
Grand Total	Rp 362.665.306.373,25

5.2.1.1.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 169.159.491.160,00 mengalami kenaikan sebesar Rp - atau - dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 169.159.491.160,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Tanah	169.159.491.160	-	-	169.159.491.160
Jumlah	169.159.491.160	-	-	169.159.491.160

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 169.159.491.160
Penambahan	
Belanja Modal	Rp -
Belanja Barang/Jasa	Rp -

Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	169.159.491.160

Berkurang

Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	169.159.491.160

5.2.1.1.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.754.153.516,00 naik sebesar Rp 3.103.303.114 atau 6,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.650.850.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Alat Besar	3.879.290.090,00	76.890.000,00	-	3.802.402.090,00
Alat Angkut	21.291.549.383,00	2.016.967.600,00	-	19.274.581.783,00
Alat Bengkel dan Ukur	1.113.103.295,00	-	-	1.113.103.295,00
Alat Pertanian dan Peternakan	1.221.068.500,00	-	-	1.221.068.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.797.660.601,00	321.808.000,00	-	9.475.852.601,00
Alat Studio dan Komunikasi	1.732.084.064,00	20.419.514,00	-	1.711.664.550,00
Alat Laboratorium	8.648.905.084,00	295.583.500,00	-	8.353.321.584,00
Alat Komputer	3.825.728.999,00	333.357.000,00	-	3.492.371.999,00
Alat Rambu Rambu	11.000.000,00	5.000.000,00	-	6.000.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.277.500	8.277.500	-	-
Alat Olahraga	200.484.000,00	-	-	200.484.000,00
Jumlah	51.754.153.516,00	3.103.303.114		48.650.850.402,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	48.650.850.402,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	1.088.128.500,00
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	9.238.514,00
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp	271.613.600,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	758.166.000,00
Koreksi	Rp	1.341.000.000,00
Jumlah	Rp	3.388.146.614,00
Pelepasan		
Ekstrakomtable	Rp	21.022.500,00
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	263.821.000,00
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp	-
 Koreksi Belanja Modal	 Rp	 -
Koreksi Belanja Hutang	Rp	-
Koreksi Tahun Lalu	Rp	-
Jumlah	Rp	284.843.500,00
Grand Total	Rp	51.754.153.516,00

5.2.1.1.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.298.165.018,00 turun sebesar Rp2.059.568.554,00 atau 2,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.357.733.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Gedung	86.632.287.616,00	-	3.678.825.145,00	90.311.112.761,00
Monumen	-	-	-	-
Menara	301.130.315,00	-	374.763.000,00	675.893.315,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.370.727.496,00	1.994.019.591,00	-	3.370.727.496,00
Jumlah	92.298.165.018,00	1.994.019.591,00	(4.053.588.145,00)	94.357.733.572,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	94.357.733.572,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	16.945.509.153,00
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-

Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp	12.357.874.589,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	16.640.000,00
Jumlah	Rp	29.320.023.742,00
Pelepasan		
Ekstrakomtable	Rp	66.867.750,00
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	30.852.724.546,00
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp	460.000.000,00
Koreksi Belanja Modal	Rp	-
Koreksi Belanja Hutang	Rp	-
Koreksi Tahun Lalu	Rp	-
Jumlah	Rp	31.379.592.296,00
Grand Total	Rp	92.298.165.018,00

5.2.1.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp166.109.001.808,00 naik sebesar Rp18.055.229.207,00 atau 12,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp148.053.772.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Jalan dan Jembatan	41.617.041.757,00	188.126.557,00	-	41.428.915.200,00
Bangunan Air/Irigasi	121.729.147.372,00	17.810.403.958,00	-	103.918.743.414,00
Instalasi	1.916.649.692,00	56.698.692,00	-	1.859.951.000,00
Jaringan	846.162.987,00	-	-	846.162.987,00
Jumlah	166.109.001.808,00	18.055.229.207,00	-	148.053.772.601,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	148.053.772.601,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	224.414.000,00
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp	18.031.389.207,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	23.840.000,00
Jumlah	Rp	18.279.643.207,00
Pelepasan		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	224.414.000,00

Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Belanja Modal	Rp	-
Koreksi Belanja Hutang	Rp	-
Koreksi Tahun Lalu	Rp	-
Jumlah	Rp	224.414.000,00
Grand Total	Rp	166.109.001.808,00

5.2.1.1.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp512.347.698,00 masih sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp512.347.698,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Bahan Perpustakaan	512.347.698,00	-	-	512.347.698,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan	-	-	-	-
Biota Perairan	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
Jumlah	512.347.698,00	-	-	512.347.698,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	512.347.698,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pelepasan		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Belanja Modal	Rp	-
Koreksi Belanja Hutang	Rp	-
Koreksi Tahun Lalu	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	512.347.698,00

5.2.1.1.6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.207.451.350,00 naik sebesar Rp639.602.150,00 atau 112.64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp567.849.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.207.451.350,00	639.602.150,00	-	567.849.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	1.207.451.350,00	639.602.150,00	-	567.849.200,00

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	567.849.200,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Hutang	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk Antar Aset Tetap	Rp	730.017.150,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	730.017.150,00
Pelepasan		
Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	49.935.000,00
Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi Belanja Modal	Rp	-
Koreksi Belanja Hutang	Rp	-
Koreksi Tahun Lalu	Rp	40.480.000,00
Jumlah	Rp	90.415.000,00
Grand Total	Rp	1.207.451.350,00

5.2.1.2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(118.375.304.176,75) naik sebesar Rp(15.218.803.070,64) atau 14,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp(103.156.501.106,11) dengan rincian sebagai berikut:

	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.052.410.742,84)	(6.084.359.122,33)	-	(34.968.051.620,51)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(26.808.880.818,22)	(1.812.397.477,71)	-	(24.996.483.340,51)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(50.514.012.615,69)	(7.322.046.470,60)	-	(43.191.966.145,09)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	(118.375.304.176,75)	(15.218.803.070,64)	-	(103.156.501.106,11)

5.2.1.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.081.344.220,00.

5.2.1.2.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.081.344.220,00

5.2.1.2.3. Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.411.982.454,70 mengalami penurunan sebesar Rp2.299.830.882,61 atau 61,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.711.813.337,31 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	758.166.000,00
Aset Tidak Berwujud	-	1.081.344.220,00
Aset Lain-lain	8.973.653.323,00	10.758.615.353,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(1.081.344.220,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.561.670.868,30)	(7.804.968.015,69)
Jumlah	1.411.982.454,70	3.711.813.337,31

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.280.247.673,77 naik sebesar Rp2.182.705.791,23 atau 0,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp363.097.541.882,54 dengan rincian sebagai berikut:

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.432.102.248 turun sebesar Rp 159.747.133 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.591.849.381 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Pendapatan Retribusi daerah	14.314.836.492	14.481.761.039
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	117.265.756	110.088.342
Jumlah	14.432.102.248	14.591.849.381

5.3.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.314.836.492 turun sebesar Rp 166.924.547 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.481.761.039 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Retribusi Jasa Usaha – LO	11.498.458.792	10.014.031.139
Retribusi Izin Perikanan - LO	2.816.377.700	4.467.729.900
Jumlah	14.314.836.492	14.481.761.039

5.3.1.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain PAD yang sah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 117.265.756 naik sebesar Rp 63.075.735 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 110.088.342 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Penerimaan Lain-lain SKPD	117.265.756	110.088.342
Jumlah	117.265.756	110.088.342

5.3.2. BEBAN

Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 112.064.304.038 naik sebesar Rp 30.891.475.344 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 81.172.828.694.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp 112.064.304.038 naik sebesar Rp 30.891.475.344 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 81.172.828.694.

	2021	2020
Beban Pegawai	32.920.883.912	45.931.232.862
Beban Barang dan Jasa	44.174.802.457	17.370.357.815
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	23.846.242.732	-
Beban Bantuan Sosial	-	6.562.645.000
Beban Penyisihan Piutang	-	-

	2021	2020
Beban Lain-Lain	55.034.635	22.791.640
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.363.525.072	4.582.023.272
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.035.730.502	2.041.389.820
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.663.618.893	4.547.922.710
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.465.833	114.465.575
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Jumlah	112.064.304.038	81.172.828.694

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp 365.280.247.673,77 naik sebesar Rp 2.182.705.791,23 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 363.097.541.882,54

	2021	2020
Ekuitas Awal	363.097.541.882,54	293.484.352.436,55
Surplus/Defisit-LO	(102.512.341.306,19)	9.807.096.691,99
RK-PPKD	103.722.113.587,00	60.018.404.754,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	972.933.510,42	(212.312.000,00)
Ekuitas Akhir	365.280.247.673,77	363.097.541.882,54

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- ii. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- iii. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton; menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton; Menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD); menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan, menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan; pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan; menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap; menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap; menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di

bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis; menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan membawahkan:

1) Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan; menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan; menyiapkan bahan sistim pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelay, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak

(destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi bidang pengawaan sumber daya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas, logistik, bina mutu dan diversifikasi produk.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Komoditas.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan; menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan; menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik; menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan; menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk; menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan; menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil

kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah; menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi; menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan; menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas.

Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

1. kewenangan pengawasan, meliputi :
 - a. operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan
 - b. penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
 2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi, rehabilitasi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 - c. penyiapan rekomendasi teknis.
 3. kewenangan lainnya, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- b. Sub bagian Tata Usaha.
- Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- c. Seksi Pengawasan;
- Bertugas menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah dan jangkauan dan perawatan armada operasi pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan; menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDKP; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan.
- Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan sub urusan konservasi,

rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan; menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan pemeriksaan *log book* (data tangkapan ikan); menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi; menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan; menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; menyiapkan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

f. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
4. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
5. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan pemeriksaan log book (data tangkapan ikan);
7. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
8. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
9. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
10. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
11. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Tata Usaha.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai ; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A.

Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa dengan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A
- b. Subbagian Tata Usaha.
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai ; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
 3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
 4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
 5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan laut;
 6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan laut;
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan penerapan teknologi; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
 4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tanggadan masyarakat;
 5. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, caloninduk, benih dan produksi budidaya ikan air payau dan laut;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan dengan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala Balai.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan.

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan. Tugas tersebut meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
4. memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
5. mengawasi peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan;
6. monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;

7. mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
 8. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
 9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 3. menyusun standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 4. melaksanakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
 5. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 6. mengembangkan induk dan benih yang tahan penyakit (uji dan pengembangan);
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

5. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dengan melaksanakan fungsi:

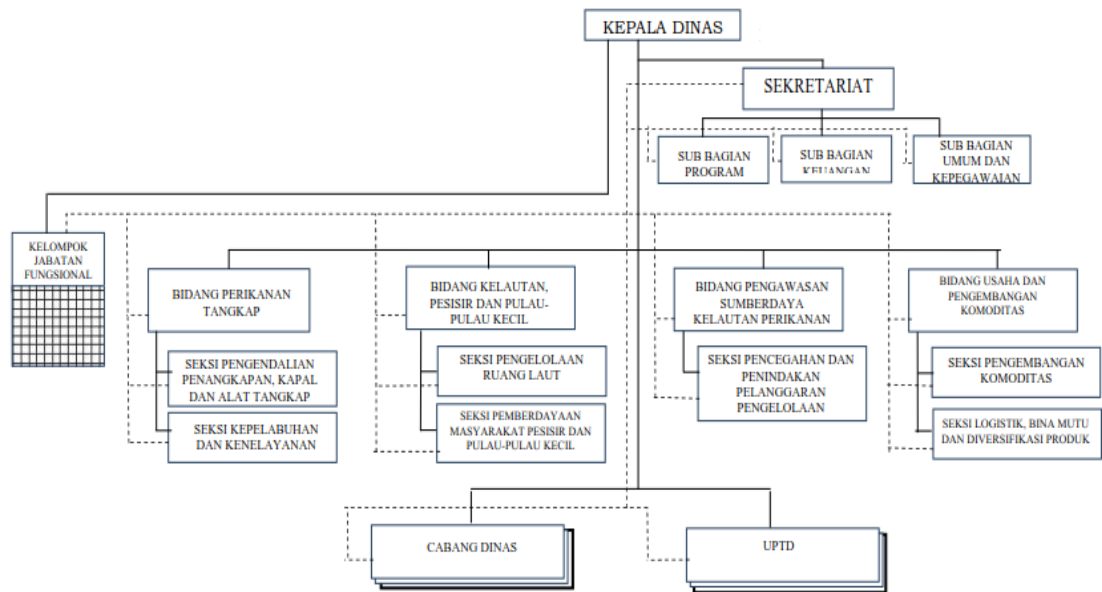
1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas:

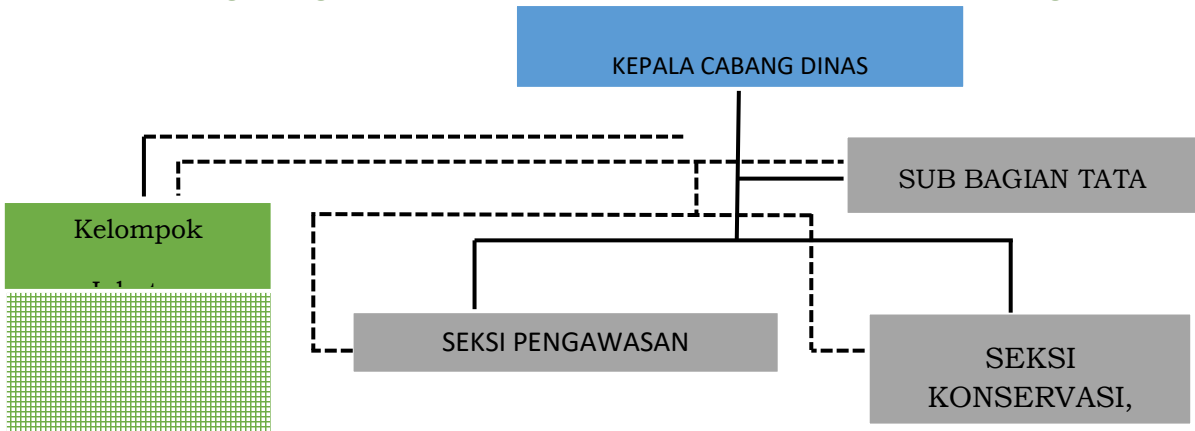
- a. Kepala Balai
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.
- b. Subbagian Tata Usaha
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tersebut meliputi :
 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 3. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
 4. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
 5. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 3. menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
 4. menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);

- 5. menyiapkan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan
- 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
- 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

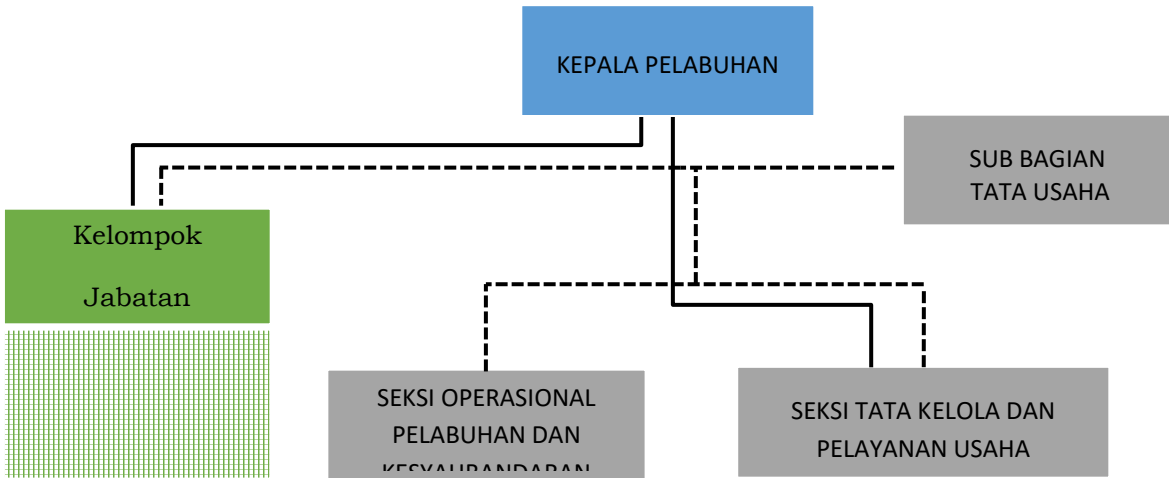
Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



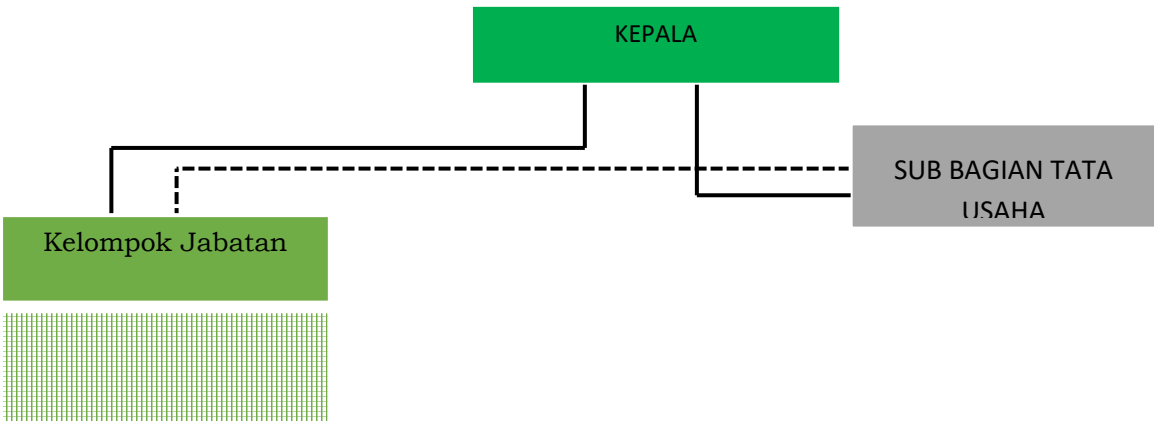
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



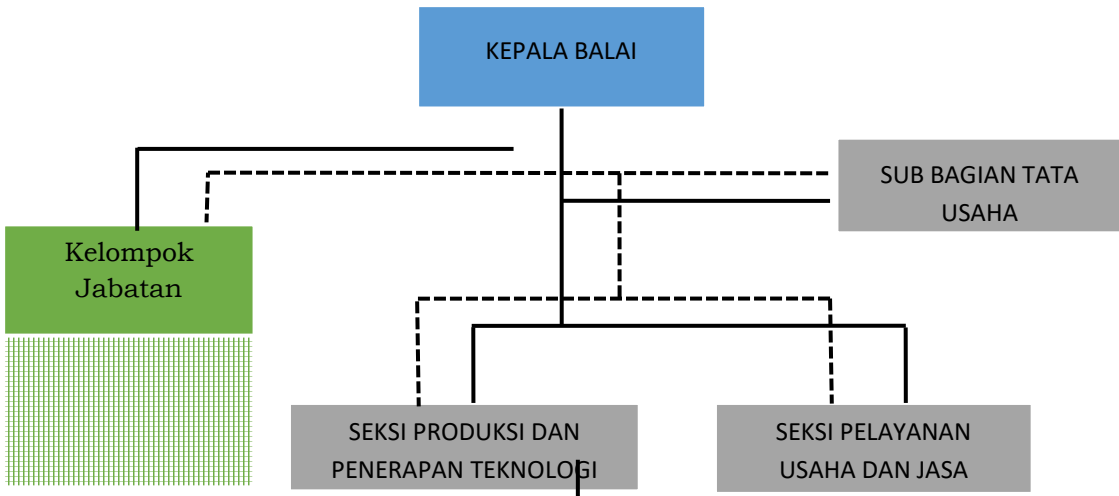
Gambar 2.2. Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



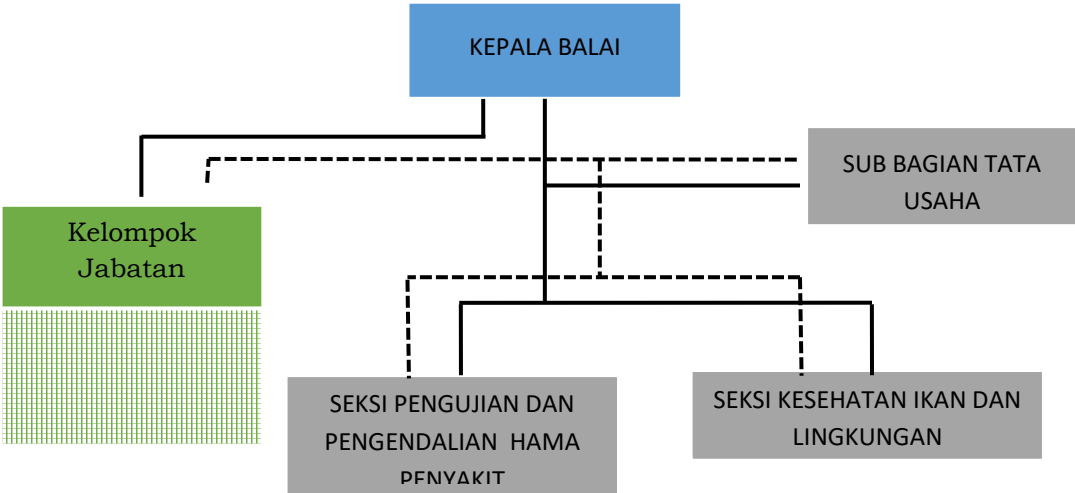
Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



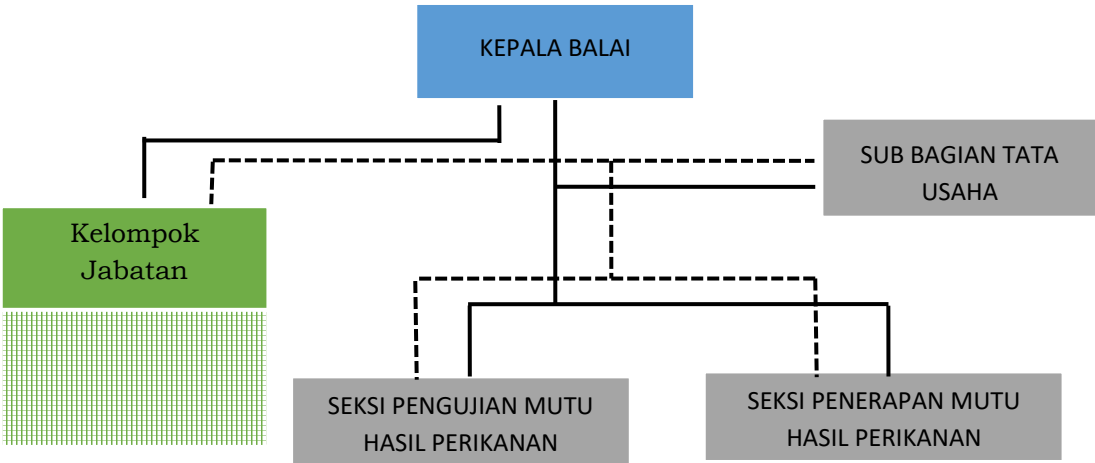
Gambar 2.4. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5. Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

6.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

6.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 263 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 9 orang, Golongan II sebanyak 43 orang, Golongan III sebanyak 187 orang dan Golongan IV sebanyak 24 orang.

6.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2019, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 2.2. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.2. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2021

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
1	Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang-50132 Telp. (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289	Luas Tanah: 5.793,96 m ² Luas Bangunan: 1.919,95 m ²
2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
3	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Jl. Panglima Sudirman No. 12 A Pati	Luas tanah: 1.997 m ² Luas bangunan: 250 m ²
4	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Jl. P. Diponegoro No.1 Magelang	Luas tanah: 54.000 m ² Luas bangunan: 200 m ²
5	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tegalsari Kota Tegal	Jl. Blanak No.10C Kota Tegal Telp. (0283) 358787	Luas Tanah: 162.299 m ² Luas Bangunan: 4.802 m ²
6	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Klidang Lor Kab. Batang	Jl Yos Sudarso Utara, Boom Batang Telp. (0285) 391283	Luas Tanah: 88.559 m ² Luas Bangunan: 6.704 m ²
7	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Morodemak Kab. Demak	Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kec. Bonang, Kab. Demak, Telp. (0291) 3406224	Luas Tanah: 3.900 m ² Luas Bangunan: 770 m ²
8	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Bajomulyo Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No.12A Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati Telp.(0295) 381689	Luas Tanah: - Luas Bangunan: 2.200 m ² (TPI Bajomulyo 1)
9	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tasikagung Kab. Rembang	Jl Dorang No.1 Kec.Rembang Kab.Rembang Telp. (0295) 691094	Luas Tanah: 8.200 m ² Luas Bangunan: 6.099 m ²
10	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Lohgending Kab. Kebumen	Desa Logending Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 18.850 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
11	Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kab. Kebumen	Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 132.681 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
12	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kab.Cilacap	Jl. Veteran No. 2 Cilacap	Luas Tanah: 14.012 m ² Luas Bangunan: 650 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
13	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Asemdayong Kab. Pemalang	Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang Telp. (0248) 3278421	Luas Tanah: 5.780 m ² Luas Bangunan: 204 m ²
14	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Luas Tanah: 13.935 m ² Luas Bangunan: 3.243 m ²
15	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Tawang Kab. Kendal	Desa Gempol Sewu Kec. Rowosari Kab. Kendal Telp. (0294) 3645668	Luas Tanah: 1.300 m ² Luas Bangunan: 792 m ²
16	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Karimunjawa Kab. Jepara	Tanjung Benteng, Desa/Pulau Karimunjawa, Kec.Karimunjawa Kab. Jepara	Luas Tanah: 10.790 m ² Luas Bangunan: 1.395 m ²
17	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Larangan	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
18	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu Semarang	Desa Karanganyar Kec.Tugu Kota Semarang	Luas tanah: 43.036 m ² Luas bangunan: 462 m ² Luas Tambak: +35.000 m ²
19	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Kab. Tegal	Jl Beringin Raya Km.10 Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal Telp. (0283) 3335709	Luas tanah: 91.940 m ² Luas bangunan: 540 m ² Luas Tambak: +35.000 m ²
20	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Kab. Rembang	Ds.Jatisari Kec.Sluke Kab.Rembang	Luas tanah: 5.751 m ² Luas bangunan: 384 m ² Luas Tambak/ Hatchery: 2.800 m ²
21	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa, Kab.Jepara	Pulau Karimunjawa Kec.Karimunjawa Kab.Jepara	Luas tanah : 11.236 m ² Luas bangunan: 240 m ²
22	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A Semarang	Jl. Empu Tantular 2, Bandarharjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah	Luas tanah : 2.320 m ² Luas bangunan: 924 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
23	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Ambarawa Kab. Semarang	Ds.Pojok Sari, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang	Luas tanah: 9.510 m ² , Luas bangunan: 965 m ²
24	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Randudongkal di Kab. Pemalang	Desa Banjaranyar, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Luas Tanah: 21.110 m ² Luas Bangunan: 150 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
25	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Singosari di Kab. Banyumas	Desa Singosari, Kec. Karangwelas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 2.000 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
26	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Muntilan Kab. Magelang	Jl. Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang Telp. (0293) 587022	Luas Kolam keseluruhan: ±15.000 m ² ; Luas Bangunan: 1.638 m ²
27	Loka Ngrajek di Kab. Magelang	Jl Mayor Kusen (Jl Raya Borobudur) Km 4, Desa Ngrajek, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang Telp. (0293) 788306	Luas Kolam : ±35.000 m ² , Luas Bangunan: ±1.085 m ²
28	Loka Janti di Kab. Klaten	Desa Janti Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Telp./Fax. (0272) 552 947	Luas kolam ±15.000 m ² , Luas bangunan dan ruang terbuka: 2.500 m ² , saluran: 21 m ²
29	Loka Tambaksogra di Kab. Banyumas	Desa Tambaksogra, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 1.500 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
30	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Semarang	Jl. Siliwangi no. 636 Semarang. Telp.(024) 7605311, 7623231. Fax. (024) 7605311	Luas Tanah: 2.320 m ² Luas Bangunan: 540 m ²
31	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	Jl. Pantaisari II Panjang Wetan Pekalongan Telp. (0285) 421675	Luas Tanah: 2.000 m ² Luas Bangunan: 417,24 m ²
32	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cilacap	Jalan Dokter Rajiman No.65, Sabukjanur, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231	Luas Tanah: 1.150 m ² Luas Bangunan: 530 m ²

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

6.2.3. Profil UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Semarang

UPT BPMHP Kelas A merupakan perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah BP2MHP milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. BPMHP Semarang memiliki 2 (dua) Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu: Pekalongan dan Cilacap dan telah terakreditasi. BPMHP berdiri sebagai unit pelaksana teknis daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.Hukum.G.102/1973 pada tanggal 19 Mei 1973 dengan nama awal yaitu Lembaga Teknologi Perikanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1977 dibentuk Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang terletak di Semarang, Pekalongan dan Cilacap. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 38 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, diterbitkan peraturan baru yang merubah nama unit laboratorium tersebut menjadi Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah diubah menjadi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan di BPMHP, antara lain;

- 1. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- 2. Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan.
- 3. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.

a) BPMHP Semarang

Jenis Kemampuan Pengujian yang ada di BPMHP Semarang, antara lain;

(1) Mikrobiologi:

ALT (Angka Lempeng Total), *Escherichi coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika:

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Garam, Kadar TVB dan TMA, *Chloramphenicol*, Formalin, Logam Berat (Hg,Pb,Cd), dan *Tetracycline*.

(3) Organoleptik:

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BPMHP Semarang meliputi seluruh Jawa Tengah

b) LPMHP Pekalongan

Jenis kemampuan pengujian di LPMHP Pekalongan, antara lain;

(1) Mikrobiologi :

Angka Lempeng Total, *Coliform*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika :

Suhu Pusat, Bobot Tuntas.

(3) Organoleptik :

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja LPMHP Pekalongan meliputi Seluruh Jawa Tengah.

c) LPMHP Cilacap

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan (LPMHP) Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Peralatan untuk pengujian organoleptik :
 - 1) Uji Organoleptik
 - 2) Uji Sensori
 - 3) Uji Filth
 - 4) Bobot Tuntas
 - 5) Suhu Pusat
2. Peralatan untuk pengujian mikrobiologi, dengan parameter uji :
 - 1) Total Plate Count (TPC)/ALT
 - 2) E.coli
 - 3) Sallmonella
 - 4) Vibrio (cholerae dan parahaemolythycus)
 - 5) Staphylococcus aerus
 - 6) Coliform
3. Peralatan untuk pengujian kimia
 - 1) Histamin
 - 2) TVB-N
 - 3) Formalin
 - 4) Antibiotik

Wilayah kerja LPMHP Cilacap meliputi Seluruh Jawa Tengah.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPP Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 6 (Enam) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Tegalsari Kota Tegal

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (Cofish), Kios Pedagang Swadana,

Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) **PPP Klidang Lor Kabupaten Batang**

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

3) **PPP Morodemak Kabupaten Demak**

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

4) **PPP Bajomulyo Kabupaten Pati**

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

5) **PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang**

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

6) **PPP Logending Kabupaten Kebumen**

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

- a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.
- b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

3. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B**

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Asemdayong Kabupaten Pemalang

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) PPP Wonokerto Kabupaten Pekalongan

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16" LS dan 109°42' BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) PPP Tawang Kabupaten Kendal

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artesis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)

- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) **PPP Larangan Kabupaten Tegal**

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

4. **Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A**

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang terletak di Jl. Empu Tantar 2 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. BLPKIL Kelas A Semarang telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang membawahi 4 (empat) Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) dan 3 (tiga) Loka di Jawa Tengah, yaitu LPKIL Ambarawa di Kabupaten Semarang, LPKIL Randudongkal di Kabupaten Pemalang, LPKIL Singosari di Kabupaten Banyumas, LPKIL Muntilan di Kabupaten Magelang, Loka Ngrajek di Kabupaten Magelang, Loka Janti di Kabupaten Klaten, dan Loka Tambaksogra di Kabupaten Banyumas. Berikut gambaran 4 (empat) LPKIL dan 3 (tiga) Loka BLPKIL, meliputi:

a. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Ambarawa Kabupaten Semarang

LPKIL Ambarawa terletak di Desa Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dengan luas tanah 9.510 m², luas bangunan 965 m² dan luas kolam 6.000 m². Selain penyediaan benih ikan bermutu tinggi dengan tahan penyakit, LPKIL Ambarawa juga menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Ambarawa juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Ambarawa merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan Karper dan Lele dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu LPKIL Ambarawa juga sebagai

tempat pengembangan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) meliputi pengembangan alat dan formulasi pakan mandiri berbasis sumberdaya lokal.

b. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Randudongkal Kabupaten Pemalang.

LPKIL Randudongkal terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan memiliki luas tanah ± 1 Ha, luas bangunan 160 m², dan luas kolam 3.308 m² dengan jumlah kolam 17 petak. Pada tahun 2014 LPKIL Randudongkal bernama BBI Randudongkal yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntitan Magelang).

Penyediaan benih ikan bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan menjadi orientasi dari LPKIL Randudongkal. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Randudongkal juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Randudongkal juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

c. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari Kabupaten Banyumas.

LPKIL Singosari terletak di Desa Singosari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 2 Ha dengan luas bangunan 1.311 m². Luas kolam 6.131 m² dengan jumlah kolam 48 petak.

LPKIL Singosari pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Singosari yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntitan Magelang). Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berubah nama menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari. Dalam orientasi kerjanya LPKIL Singosari melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Singosari juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Singosari juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

d. *Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan Kabupaten Magelang.*

LPKIL Muntilan terletak di Jl.Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan produksi perikanan di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur pada Tahun 1953 maka dibentuklah Balai Pendidikan Perikanan (BPP) Muntilan, Magelang. Dengan berlakunya Perda No. 1 Tahun 2002 maka BPP Muntilan berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BPBI), yang selanjutnya melalui Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2008 berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) yang berkedudukan di Muntilan. Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2016, BPBIAT berubah menjadi Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan. Terletak di ketinggian 350 m di atas permukaan air laut yang mempunyai topografi landai sampai datar dengan suhu udara berkisar antara 25°C -33°C. Mempunyai luas lahan 2,93 ha dengan sumber air berasal dari saluran irigasi Sungai Lamat. Debit air musim hujan 20-30 liter per detik, sedangkan pada musim kemarau 5-10 liter per detik.

Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan alam orientasi kerjanya melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Muntilan juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Muntilan juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan lele dan karper dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

e. *Loka Ngrajek Kabupaten Magelang*

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkring dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phytton), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyediaan induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian

kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

f. Loka Janti Kabupaten Klaten

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB -1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

g. Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

5. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya berada di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Luas tanah LBIAP Maribaya adalah 40.000 m² dengan luas bangunan sebesar 350 m², serta luasan tambak mencapai 26.390 m².

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke berada di Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Luas tanah PIAP Sluke adalah 5.751 m² dengan luas bangunan sebesar 384 m², sarana yang dimiliki antara lain 11 bak *indoor* dan 16 bak *outdoor*.

Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

6.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Produksi Perikanan Tangkap, Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase Peningkatan Produksi Induk Dan Benih, Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan, Volume Ekspor Hasil Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Garam, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Wanita dan Taruna Pesisir;
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, meliputi: Jumlah Stakeholder yang Memahami Peraturan Tata Ruang Laut, Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan, Peningkatan Luas Kawasan Mangrove, Perlindungan Terumbu Karang, Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, serta Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berharap laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk pengambilan keputusan di masa depan Provinsi Jawa Tengah.

L A M P I R A N



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 27/Rekon/I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **RUDI NUGROHO, S.E., M.M.**
NIP : 19700524 199603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SLAMET, AK.**
NIP : 19660215 198603 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **DEWI YULIAWATI, S.P., M.Si.**
NIP : 19680703 199203 2 007
Jabatan : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

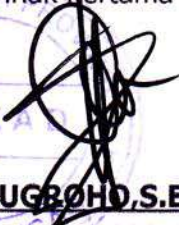
Dibuat di Semarang, 13 Januari 2022

Pihak Ketiga

DEWI YULIAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19680703 199203 2 007

Pihak Kedua

SLAMET, AK.
NIP. 19660215 198603 1 001

Pihak Pertama

RUDI NUGROHO, S.E., M.M.
NIP. 19700524 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman http: // www.jatengprov.go.id
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran I

REKONSILIASI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi Bid Akt BPKAD (Rp)	Realisasi SKPD (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	14.432.102.248	14.432.102.248		
Pajak Daerah	-	-		
Retribusi Daerah	14.314.836.492	14.314.836.492		
Lain-Lain PAD yang Sah	117.265.756	117.265.756		
Belanja				
Belanja Pegawai	32.920.883.912	32.920.883.912		
Belanja Barang dan Jasa	43.221.347.938	43.221.347.938		
Belanja Subsidi	-	-		
Belanja Hibah	23.846.242.732	23.846.242.732		
Belanja Bantuan Sosial	-	-		
Belanja Modal	18.178.051.653	18.178.051.653		

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 terlampir.

Pihak Ketiga

DEWI YULIAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19680703 199203 2 007

Pihak Kedua

SLAMET, A.K.
NIP. 19660215 198603 1 001

Pihak Pertama

RUDI NURROHO, S.E., M.M.
NIP. 19700524 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran II

REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

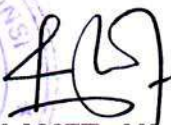
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021

Uraian	Rekapitulasi Kasda (Rp)	Rekapitulasi SKPD (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Penerimaan				
Pendapatan	14.432.102.248	14.432.102.248		
<i>Contrapost</i> Belanja Pegawai	67.929.760	67.929.760		
<i>Contrapost</i> Belanja Barang & Jasa	158.905.336	158.905.336		
<i>Contrapost</i> Belanja Modal	-	-		
Pengembalian UP dan TU	2.646.276.182	2.646.276.182		
Kas di Bendahara Penerimaan	12.310.400	12.310.400		Pendapatan 2020 yang disetor 2021
Total	17.317.523.926	17.317.523.926		
Pengeluaran (SP2D)				
LS Pegawai	32.988.813.672	32.988.813.672		
LS Barang & Jasa	50.127.058.905	50.127.058.905		
UP	1.705.429.000	1.705.429.000		
GU	13.738.668.815	13.738.668.815		
TU	22.479.667.121	22.479.667.121		
Total	121.039.637.513	121.039.637.513		

Rincian Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 terlampir.

Pihak Ketiga

DEWI YULAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19680703 199203 2 007

Pihak Kedua

SLAMET, A.K.
NIP. 19660215 198603 1 001

Pihak Pertama

RUDI NUGROHO, S.E., M.M.
NIP. 19700524 199603 1 003